



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN BURUH INDONESIA  
(MPBI): Media Konsensus Perserikatan Buruh dan Pemerintah  
Orde Baru tahun 1968 – 1973**

**Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun Oleh :**

**DINAR FITRA MAGHISZHA  
NIM 13030111120005**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2018**

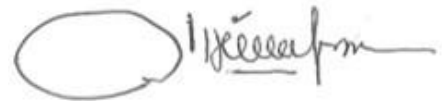
## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Dinar Fitra Maghiszha, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3), pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang termuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain yang dipublikasikan maupun yang tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, Agustus 2018

Penulis



Dinar Fitra Maghiszha

NIM 13030111120005

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“**Serikat Buruh** bukanlah bagian dari sesuatu **party politik**. Apa jang dikerdjakan oleh Serikat Buruh tak dapat **dikerdjakan oleh party** dan apa jang didjalankan party bukanlah kewadjiban **serikat sekerdja**. Tetapi ini tidak harus diartikan bahwa serikat sekerdja **dalam gerakannya harus bebas** sama sekali dari **gelombang politik**, atau lebih djauh lagi, bahwa setiap kaum buruh **buta politik sama sekali tidak !**”

**- Iskandar Tedjasukmana –**

(Pemimpin Himpunan Induk Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HISBI), Ketua Biro Politik Partai Buruh, dan Menteri Perburuhan dalam Kabinet Sukiman; Wilopo; dan Burhanudin Harahap (1951-1953, 1956))

Dipersembahkan kepada:

(1) Mereka yang mengingat Marsinah dan pejuang kemanusiaan yang menderita atau mati, (2) Perserikatan Buruh di Seluruh Indonesia sekarang dan di masa depan yang sedang berjuang.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui oleh  
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Yuliati', written in a cursive style.

Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.  
NIP 19540725 198603 2 001

Skripsi dengan judul “Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI): Media Konsensus Pemerintah dengan Perserikatan Buruh tahun 1968 - 1973” yang disusun oleh Dinar Fitra Maghiszha (13030111120005), telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Kamis, 30 Agustus 2018

Ketua,



Dr. Agustinus Supriyono, M.A.  
NIP 19550315 198703 1 001

Anggota I,



Prof. Dr. Dewi Yulianti, M.A.  
NIP 19540725 198603 2 001

Anggota II,



Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.  
NIP 19640711 199001 1 001

Anggota III,



Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.  
NIP 19721119 199802 1 002

Mengesahkan,  
Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum.  
NIP. 195903071986031002

## KATA PENGANTAR

Penelitian skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir pada Program Strata-1 di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Topik penelitian ini bermula dari minat pribadi tentang kajian perburuhan terutama pada pokok studi persoalan serikat buruh dan gerakan politik. Selain karena minat, juga terdapat janji pribadi penulis terhadap diri sendiri untuk menyelesaikan studi sarjana dengan tema “buruh”. Pembuatan proposal skripsi yang telah dimulai sejak tahun 2015 menemui berbagai tantangan dan hambatan, yang kemudian dapat berlanjut hingga lembar kata pengantar ini dibuat.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk baik berupa material maupun spiritual kepada:

1. Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang memberi izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, Dekan sebelumnya Prof. Dr. Agus Maladi Irianto, M.Hum, yang juga memberi izin dan motivasi kepada penulis.
2. Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Sejarah FIB Undip yang memberi motivasi, izin dan kemudahan administrasi. Selain itu, Ketua Jurusan sebelumnya Dr. Endang Susilowati, M.Hum., yang memberi motivasi, memberi kemudahan akses terhadap dimulainya awal penelitian penulis dan mempertemukan penulis dengan dosen pembimbing favorit.
3. Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberi bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini,
4. Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum., selaku Dosen Wali yang dengan sabar juga memberi saran dan nasehat terhadap penulis,

5. Dr. Agustinus Supriyono, M.A., Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum., dan Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang senantiasa sabar pada saat proses ujian skripsi berlangsung.
6. Mbak Fatma, Mas Oscar, selaku pihak Tata Usaha dan Pak Romli selaku penjaga perpustakaan yang banyak membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi dan hal-hal yang mendesak.

Lebih lanjut lagi, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) di KBN Cakung, khususnya srikandi-srikandi hebat, Mbak Dian Septi, Mbak Dian Novita, Mbak Ika, Mbak Jum, juga Mas Yoyok dan lainnya yang sejak tahun 2013 memberi ilmu dan membantu mendobrak tembok besar keragu-raguan penulis untuk fokus pada tema-tema perjuangan kaum tertindas. Kemudian, Prof. Muchtar Pakpahan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) atas kesediaan waktunya berdiskusi dan bertukar gagasan. Pegawai ANRI, khususnya Mas Widi (Sejarah 2004) dan Mbak Kiki. Pegawai Monumen Pers (Mas Bambang). Kemudian individu-individu dari banyak organisasi buruh dan pergerakan rakyat dari ragam aliran dan ideologi di Semarang, Jakarta, Solo, Jogja dan Makasar yang penulis ajak diskusi dan banyak memberi sumbangan ide, informasi juga pengetahuan terkait penelitian ini.

Selanjutnya untuk urusan semangat dan motivasi, terima kasih kepada semua teman-teman jurusan Sejarah Angkatan 2011, mahasiswa sejarah lintas angkatan, mahasiswa jurusan lain dan alumni FIB Undip, yang membantu penulis pada urusan-urusan yang detail, diskusi random sampai pagi, ngobrol filsafat, curhat, dan sebagainya. Selain itu lecutan “untuk segera lulus” dari semua sahabat di Badan Eksekutif Mahasiswa FIB Undip (2012-2014), HMJ Sejarah (2013), UKM KMMS (Kharisma) (2012-2013), semua teman naik gunung, dan individu-individu lain yang membantu penulis untuk tumbuh dan berkembang.

Kemudian, terima kasih kepada siapa saja yang sudah penulis anggap sebagai keluarga, baik keluarga kandung se-KK, saudara, dan orang-orang terkasih yang pernah mendapat simpati dari penulis selama berproses menjadi mahasiswa, menjadi manusia. Kepada subjek-subjek fiktif dalam novel, film, maupun anime yang di waktu senggang saat bosan dan jenuh, selalu

mengingatkan penulis untuk terus melanjutkan hidup, berjuang dan menjadi otentik. Yang terakhir, kepada kekuatan-kekuatan yang tak tampak di luar sana yang begitu hebatnya menemani saat sendiri di rimba kehidupan dan membantu persoalan-persoalan yang terlihat besar dan mustahil, namun bisa diselesaikan. Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan mempunyai banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun isinya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan skripsi ini di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat mengisi kekosongan sejarah perburuhan di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

Semarang, Agustus 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xxxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xxxv</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xxxvii</b>
<b><i>ABSTRACT</i></b>	<b>xxxviii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	30
<b>BAB II    MENUJU PEMBENTUKAN MAJELIS           PERMUSYAWARATAN BURUH INDONESIA (MPBI)           TAHUN 1945 - 1965</b>	<b>34</b>
A. Serikat Buruh dalam Arena Politik (1945 – 1965)	35
1. Serikat Buruh dengan Afiliasi Partai Politik	43
a. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) tahun 1946	45
b. Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) tahun 1948	48
c. Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) tahun 1951	51
d. Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) tahun 1952	53
e. Himpunan Induk Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HISSBI) tahun 1952	55

f.	Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) tahun 1953	57
g.	Sentral Organisasi Buruh Pancasila (SOB Pancasila) tahun 1954	61
h.	Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) tahun 1955	62
i.	Gabungan Organisasi Buruh Syarikat Islam Indonesia (GOBSI-Indonesia) tahun 1955	63
j.	Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM) tahun 1956	63
k.	Kesatuan Organisasi Buruh Pancasila (KUBU-PANCASILA) tahun 1961	64
l.	Gerakan Buruh Muslimin Indonesia (GERBUMI) tahun 1961	65
m.	Kesatuan Buruh Marhaen (KBM) tahun 1962	65
n.	Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (KESPEKRI) tahun 1963	66
2.	Serikat - Serikat Buruh Bentukan Militer (1957 – 1965)	66
a.	Swadiri Organisasi Karya Seluruh Indonesia (SOKSI) tahun 1960	68
b.	Kesatuan Karyawan-Buruh (KEKARBU) tahun 1960	70
3.	Serikat - Serikat Buruh Independen (1945 – 1965)	71
a.	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 1945	71
b.	Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) tahun 1948	72
B.	Dinamika Konflik Antar Serikat Buruh (1946 – 1965)	74
1.	Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HISSBI) sebagai Induk Pemersatu: Usaha Penyatuan Serikat Buruh dan Kegagalannya	77
2.	Konflik Ideologi Antarserikat Buruh: Perseteruan SOBSI dengan SOKSI	83
C.	Keterlibatan Pemerintah dalam Penyatuan Antarserikat Buruh (1957 – 1965)	90
1.	Badan Kerja Sama Buruh – Militer (BKS-BuMil): Koalisi Serikat Buruh dengan Angkatan Bersenjata	91
2.	Pembentukan Front Nasional (FN) sebagai Badan Pemersatu Induk Serikat Buruh	96
3.	Sekretariat Bersama Golongan Karya – (SEKBER GOLKAR) dan Doktrin Anti-Partai: Kerja Sama	101

## Politik Sipil dan Militer

<b>BAB III</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN KONSENSUS POLITIK: PERBURUHAN NASIONAL DALAM MASA TRANSISI TAHUN 1965 -1968</b>	<b>110</b>
A.	Bencana Kemanusiaan dan Pembersihan (1965-1967)	111
1.	Aksi Demonstrasi Massa Pasca G30S	114
2.	Terbentuknya Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) dan Pembersihan Serikat Buruh dari Unsur Komunis	117
B.	Restrukturisasi dan Perubahan Fungsi dalam Organisasi Buruh (1965 – 1968)	121
1.	Pembubaran Front Nasional	124
2.	Pengangkatan Menteri dan Penghapusan Hari Buruh Internasional 1 Mei	134
3.	Lahirnya Kekuatan Baru: Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR) dan Konsolidasi Perserikatan Buruh	138
C.	Badan Kerja Proyek Buruh Indonesia (BAKERPROBI): Kerja Sama Pemerintah Orde Baru dengan Organisasi Luar Negeri	143
<b>BAB IV</b>	<b>KONSENSUS SEBAGAI JALAN POLITIK: Di Sekitar Pembentukan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) tahun 1968 - 1969</b>	<b>149</b>
A.	Kemelut Politik dan Militerisasi Perserikatan Buruh	150
B.	Usaha Pemerintah Orde Baru Membangun Konsensus Politik	152
1.	Pertemuan Pemerintah dengan Sembilan Induk Serikat Buruh Tingkat Nasional, 20 Juni 1968	153
2.	Pernyataan Bersama Nasional, 25 Oktober 1968	157
C.	Pembentukan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI): Pertentangan dalam Perumusan Peraturan Dasar MPBI tahun 1969	160
1.	“Wadah Bersama Perjuangan Buruh” sebagai Cita-cita Awal MPBI	162
2.	“Wadah Tunggal sebagai Alternatif: Doktrin Sentralisme dalam Sidang Pleno MPBI	167
3.	Peresmian MPBI oleh Presiden Suharto di Istana Merdeka	173

<b>BAB V</b>	<b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN BURUH INDONESIA (MPBI): Media Konsensus Politik dan Kemundurannya tahun 1969 - 1973</b>	<b>178</b>
	A. Bentuk – Bentuk Konsensus Politik	178
	1. Seminar MPBI dan Indoktrinasi Penguasaan Kepemimpinan dan Penyebaran Ajaran Serikat Buruh Berorientasi Ekonomi (1969 – 1971)	182
	2. Pertemuan MPBI dengan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) tahun 1972	186
	B. Kemunduran MPBI sebagai Media Konsensus	192
	C. Peleburan MPBI ke Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) tahun 1973	195
	1. Pembentukan Korps Karyawan (Kokar): Pemangkasan Massa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Serikat Buruh Anggota MPBI (1970 – 1971)	196
	2. Deklarasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai Satu-Satunya Vaksentral Serikat Buruh tahun 1973	205
<b>BAB VI</b>	<b>SIMPULAN</b>	<b>212</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>215</b>
	<b>DAFTAR INFORMAN</b>	<b>228</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	<b>229</b>

## DAFTAR SINGKATAN

3M	: Membantu, Menyerah, atau Mati
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Anggaran Dasar / Angkatan Darat
AFL-CIO	: <i>American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations</i>
AL	: Angkatan Laut
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
ART	: Anggaran Rumah Tangga
AU	: Angkatan Udara
BAKERPROBI	: Badan Kerja Sama Proyek Buruh Indonesia
BAKIN	: Badan Koordinasi Intelijen Negara
BBI	: Barisan Buruh Indonesia
BBW	: Barisan Buruh Wanita
BI	: Berita Indonesia
BKBI	: Badan Koordinasi Buruh Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing
BKS BuMil	: Badan Kerja Sama Buruh Militer
BPBSI	: Badan Permusyawaratan Buruh Seluruh Indonesia
BPHS	: Badan Pimpinan Harian Sementara
BPSS	: Badan Pusat Serikat-Serikat Sekerja
BRIGJEND	: Brigadir Jenderal
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CC	: <i>Committee Central</i>
Cq	: <i>Casu Quo</i> (Bahasa Latin) yang berarti “dalam hal ini”
DEKON	: Deklarasi Ekonomi
DEPNAKER	: Departemen Tenaga Kerja
DP	: Dewan Partai / Dewan Pimpinan / Dewan Pusat
DPAS	: Dewan Pertimbangan Agung Sementara
DPH	: Dewan Pimpinan Harian

DPP	: Dewan Pimpinan Pusat / Dewan Pimpinan Pleno
DPRGR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DSBI	: Dewan Serikat Buruh Indonesia
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
FBI	: Federasi Buruh Indonesia
FES	: <i>Frederich Ebert Stiftung</i>
FIB	: Fakultas Ilmu Budaya
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
FN	: Front Nasional
FNPIB	: Front Nasional Pembebasan Irian Barat
FP	: Front Pancasila
GABSU	: Gabungan Buruh Sulawesi Utara
GASBI	: Gabungan Serikat Buruh Indonesia
GASBRI	: Gabungan Serikat Buruh Revolusioner
GASBV	: Gabungan Serikat Buruh Vertikal
GASPI	: Gabungan Serikat Sekerja Partikelir Indonesia
GB	: Gerakan Buruh / Gabungan Buruh
GBP	: Gerakan Buruh Pelabuhan
GERBUMI	: Gerakan Buruh Muslimin Indonesia
GERWANI	: Gerakan Wanita Indonesia
GESTAPU	: Gerakan September Tiga Puluh
GESTOK	: Gerakan Satu Oktober
GOBSII	: Gerakan Organisasi Buruh Syarikat Islam Indonesia
GOLKAR	: Golongan Karya
GSBI	: Gabungan Serikat Buruh Indonesia
GTP	: Gerakan Tentara Pelajar
HIMBI	: Himpunan Buruh Indonesia
HISSBI	: Himpunan Serikat Serikat Buruh Indonesia

HISSBI BARU	: Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia – Baru
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HPP	: Hubungan Perburuhan Pancasila
ICFTU	: <i>International Confederation of Trade Union</i>
ICOSS	: Ikatan Central Organisasi Serikat Sekerdja
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
IGGI	: <i>Inter-Government Group of Indonesia</i>
IKM	: Ikatan Karyawan Muhammadiyah
ILO	: <i>International Labour Union</i>
IPB	: Institut Pertanian Bogor
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPPI	: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
ISI	: Ikatan Sarjana Indonesia
KAA	: Konferensi Asia Afrika
KABI	: Kesatuan Aksi Buruh Indonesia
KABIR	: Kapitalisme Birokrat
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri
KAGI	: Kesatuan Aksi Guru Indonesia
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI	: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
KAS	: Komando Aksi Strategis
KASI	: Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
KAP-GESTAPU	: Kesatuan Aksi Pengganyangan – Gerakan September Tiga Puluh
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KBIM	: Konggres Buruh Islam Merdeka
KBKI	: Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia
KBM	: Kesatuan Buruh Marhaen
KBSI	: Konggres Buruh Seluruh Indonesia
KEKARBU	: Kesatuan Karyawan Buruh

Kep	: Keputusan
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KESPEKRI	: Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KOBI	: Koordinasi Buruh Indonesia
KODAM	: Komando Daerah Militer
KOGAM	: Komando Operasi Ganyang Malaysia
KOKAR	: Korps Karyawan
KOKARMENDAGRI	: Korps Karyawan Kementerian Dalam Negeri
KONGKARBU	: Konsentrasi Golongan Karya Buruh
KOPKAMTIB	: Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
KORPRI	: Korps Pegawai Republik Indonesia
KOSGORO	: Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong
KOSTRAD	: Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
KOTI	: Komando Operasi Tertinggi
KOTI-V	: Komando Operasi Tertinggi Gabungan 5
KPM	: <i>Koninklijke Paketvaart Maatschappij</i>
Kpts	: Keputusan
KSAD	: Kesatuan Staf Angkatan Darat
KUBU PANCASILA	: Kesatuan Organisasi Buruh Pancasila
LAKSDA	: Laksamana Madya
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LBI	: Laskar Buruh Indonesia
LEKRA	: Lembaga Kebudayaan Rakyat
LETJEND	: Letnan Jenderal
LETTU	: Letnan Satu
MANIPOL	: Manifestasi Politik
MASYUMI	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia



MAYJEND	: Mayor Jenderal
MBI	: Majelis Buruh Indonesia
MENAKER	: Menteri Tenaga Kerja
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
MKGR	: Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
MPBI	: Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MURBA	: Musyawarah Rakyat Banyak
NASAKOM	: Nasional, Agama, Komunis
NU	: Nahdlatul Ulama
OPSUS	: Operasi Khusus
ORBA	: Orde Baru
ORLA	: Orde Lama
ORMAS	: Organisasi Masyarakat / Organisasi Massa
ORPOL	: Organisasi Politik
PANGAD	: Panglima Angkatan Darat
PANGDAM	: Panglima Daerah Militer
PANGTI	: Panglima Tertinggi
PARAN	: Panitia <i>Retooling</i> Aparatur Negara
PARKINDO	: Partai Kristen Indonesia
PARMUSI	: Partai Muslimin Indonesia
PARPOL	: Partai Politik
PARTINDO	: Partai Indonesia
PB	: Partai Buruh / Pengurus Besar
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBFN	: Pengurus Besar Front Nasional
PBI	: Partai Buruh Indonesia
PBKA	: Persatuan Buruh Kereta Api
PBPB	: Pusat Badan Perjuangan Buruh
PD	: Pejabat (Singkatan Lama)

PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PELITA	: Pembangunan Lima Tahun
PEMILU	: Pemilihan Umum
PEPELRADA	: Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah
PEPERDA	: Penguasa Perang Daerah
PEPERPU	: Penguasa Perang Pusat
PERBEPSI	: Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia
PERBUM	: Persatuan Buruh Minyak
PERBUPRI	: Persatuan Buruh Perkebunan Republik Indonesia
PERKABI	: Persatuan Karyawan dan Buruh Indonesia
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PERSAJA	: Persatuan Jaksa
PERTI	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PETANI	: Persatuan Tani Indonesia
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PPI	: Pemuda Islam Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKRI	: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
PN	: Perusahaan Negeri
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POB	: Perhimpunan Organisasi Buruh
POLITBIRO	: <i>Politicheskoye Buro</i> (Bahasa Rusia)
PORBISI	: Persatuan Organisasi Buruh Islam Seluruh Indonesia
PP	: Peraturan Presiden
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan

PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PSOBSI	: Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
PSPN	: Persatuan Serikat Pegawai Negeri
REPELITA	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RHS	: Rahasia
RI	: Republik Indonesia
RKS	: Rapat Kerja Sama
RPKAD	: Resimen Para Komando Angkatan Darat
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
SARBUMUSI	: Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
SARBUPRI	: Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SB	: Serikat Buruh
SBDPU	: Serikat Buruh Departemen Pekerjaan Umum
SBG	: Serikat Buruh Gula
SBII	: Serikat Buruh Islam Indonesia
SB INTERNATION	: Serikat Buruh <i>International</i>
SB KEMPEN	: Serikat Buruh Kementerian Penerangan
SB KEMPERBU	: Serikat Buruh Kementerian Perburuhan
SBKA	: Serikat Buruh Kereta Api
SBLP	: Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan
SB PEGADAIAN	: Serikat Buruh Pegadaian
SB PERPI	: Serikat Buruh – Perusahaan Penerbangan Indonesia
SBPI	: Serikat Buruh Percetakan Indonesia
SB-POSTEL	: Serikat Buruh – Pos dan Telepon
SBPP	: Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran
SBR-RI	: Serikat Buruh Radio – Republik Indonesia
SEBDA	: Serikat Buruh Daerah <i>Autonom</i>
SEKBER	: Sekretariat Bersama
SEKBER GOLKAR	: Sekretariat Bersama Golongan Karya

SEKKAB	: Sekretaris Kabinet
SOB	: <i>Staat van Oorlog en Beleg</i>
SOB PANCASILA	: Sentral Organisasi Buruh Pancasila
SOBRI	: Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	: Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia / Swadiri Organisasi Karya Seluruh Indonesia
SP	: Surat Perintah
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
SS	: Serikat Sekerja
SS-BNI	: Serikat Sekerja Bank Nasional Indonesia
SS-BRI	: Serikat Sekerja Bank Rakyat Indonesia
SS-DEPORA	: Serikat Sekerja Departemen Pemuda dan Olahraga
SS-DEPSOS	: Serikat Sekerja Departemen Sosial
SSKDN	: Serikat Sekerja Dalam Negeri
SSPTT	: Serikat Sekerja Pos, Telegram, Telekomunikasi
SUPERSEMAR	: Surat Perintah Sebelas Maret
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TP	: Tentara Pelajar
UI	: Universitas Indonesia
UMS	: Universitas Muhammadiyah Surakarta
UNDIP	: Universitas Diponegoro
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUPBH	: Undang-Undang Pembagian Bagi Hasil
USU	: Universitas Sumatera Utara
WFTU	: <i>World Federation of Trade Union</i>
YTKI	: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia

## DAFTAR ISTILAH<sup>1</sup>

- 3M (Membantu, Menyerah atau Mati)* : istilah yang ada pada saat konflik kemanusiaan tahun 1965 - 1969. Istilah ini beredar di sebagian besar masyarakat untuk merespon politik penghancuran gerakan komunis di daerah-daerah
- Afiliasi* : bentuk kerjasama antara dua lembaga yang masing-masing berdiri sendiri. Afiliasi juga dapat diartikan “anggota” atau “cabang” dari suatu organisasi.
- Afiliator* : para pelaku afiliasi
- Afspraak* : (bahasa Belanda) yang berarti penunjukkan, titik temu, kesepakatan.
- Amandeer* : amandemen, pelaku pengamandemen
- Anarkisme Kolektif* : suatu ideologi yang berkaitan dengan sistem sosial dan politik dengan tujuan untuk menghadirkan masyarakat tanpa negara
- Antidemokrasi* : para penolak sistem demokrasi
- Antimanipol* : kelompok yang anti terhadap semua manifestasi politik terutama manipol Sukarno
- Antinasakom* : penolakan terhadap seluruh gagasan nasakom
- Antipartai* : sebagian kalangan yang anti terhadap kegiatan-kegiatan partai politik. Mereka menghendaki adanya gagasan partai tunggal untuk meredam gejolak pertarungan politik partai

---

<sup>1</sup> Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi yang disesuaikan dengan konteks kalimat dalam paragraf.

- Asas Karyawanisme* : suatu ideologi baru pada masa Orde Baru yang menjadi antitesa dari gagasan perjuangan kelas. Ideologi ini berisi hubungan timbal-balik antara pekerja-pengusaha yang menolak kontradiksi antarkelas tersebut
- Asas Kekeluargaan* : asas hubungan industrial yang menempatkan pekerja dan pengusaha sebagai mitra pembangunan
- Avonturisme* : paham bagi para petualang yang bergeliat dalam urusan politik untuk meraih keuntungan individu
- Blue Collar* : buruh kasar yang tidak mempunyai keahlian khusus
- Baladhika Karya* : resimen sipil yang dibentuk oleh pihak Angkatan Darat untuk mengamankan perusahaan-perusahaan negara dari aktivitas pengambilalihan yang dilakukan oleh unsur serikat buruh afiliasi PKI
- Borjuis* : pemilik modal, pemilik tanah, majikan
- Briefing* : dalam konteks komunikasi yang berarti bentuk komunikasi tatap muka untuk menyatukan anggota, mengingatkan prioritas atau tugas-tugas kelompok.
- Buruh* : orang yang bekerja pada pemilik modal untuk memperoleh upah atau gaji berupa uang
- Capitalism* : ideologi yang menerangkan bahwa sistem ekonomi di mana perdagangan, industry dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan pasar.
- Caretaker* : pelaksana tugas, atau orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan tertentu dalam waktu yang sementara
- Civil Society* : masyarakat sipil yang merujuk pada

	masyarakat yang mencakup semua organisasi swasta, seperti, serikat dagang, serikat buruh, gereja, perkumpulan budaya di luar dari aparaturnegara
<i>Common Platform</i>	: hasil kesepakatan bersama dari berbagai kalangan terhadap suatu aturan yang berlaku
<i>Communism</i>	: ideologi yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial, politik yang tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat komunis berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial
<i>Controlling</i>	: mengendalikan
<i>Crucial Points</i>	: poin vital atau sesuatu yang sangat penting
<i>Das Sein</i>	: yang berarti kenyataan
<i>Das Sollen</i>	: yang berarti angan-angan
<i>Degradasi</i>	: penurunan suatu nilai
<i>Departemen Hitam</i>	: Departemen Perburuhan pada masa awal Orde Baru yang merupakan departemen pertama yang dibersihkan dari segala unsur komunis
<i>Devide et Impera</i>	: politik memecah-belah Belanda
<i>Dikotomi</i>	: pengambilan suatu nilai dengan menempatkan dua hal yang berbeda dan sangat sulit untuk disatukan
<i>Diktator</i>	: pemimpin negara yang memerintah secara otoriter dan menindas rakyatnya
<i>Diktator Proletariat</i>	: Adalah sebuah entitas pimpinan kaum tertindas yang melawan. Gagasan yang dicetuskan oleh Karl Marx yang berada dalam konteks ideologi Komunisme.
<i>Doktrin Karyawan</i>	: sebuah doktrin yang dikampanyekan oleh SOKSI untuk menentang istilah buruh yang berkonotasi perjuangan kelas
<i>Euforia</i>	: suatu momentum kegembiraan dan kesenangan

<i>Elite</i>	: suatu kelompok tertentu yang mempunyai nilai lebih
<i>Elite organisasi</i>	: organisasi senior yang telah besar dan banyak pengalaman
<i>Eugemonia</i>	: dalam bahasa Yunani kuno berarti hegemoni atau bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual
<i>Federalisme</i>	: dalam konteks kelembagaan berarti suatu sistem organisasi yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi
<i>Federasi</i>	: badan organisasi yang berbentuk gabungan dari beberapa himpunan yang bekerjasama dalam satu badan
<i>Federatif</i>	: bentuk organisasi yang bersifat federal
<i>Fobia Komunis</i>	: julukan bagi individu atau kelompok yang anti terhadap gagasan komunis
<i>Fobia Nasakom</i>	: julukan bagi individu atau kelompok yang anti terhadap gagasan nasakom
<i>Fungsi Kekaryaannya</i>	: fungsi yang dimiliki oleh militer dalam urusan-urusan sipil
<i>Fusi</i>	: penggabungan atau penyederhanaan antarorganisasi ke dalam satu organisasi
<i>Ganyang Malaysia</i>	: istilah dari Sukarno yang merupakan bentuk kebijakan politik konfrontasi menolak pembentukan federasi Malaysia
<i>Golongan karya</i>	: istilah dalam lembaga Front Nasional. Kelompok ini diorganisir oleh koalisi militer dan sipil untuk menampung organisasi non-afiliasi partai politik. Dalam kegiatannya, kelompok ini menjadi antitesa dari gerakan buruh komunis.
<i>Golongan non politik</i>	: Golongan ini juga mempunyai tendensi anti-partai dan segala sesuatu yang berkaitan



dengan pertentangan politik antarpartai

- Golongan politik* : istilah dalam lembaga Front Nasional. Kelompok ini merupakan partai politik dan organisasi-organisasi yang berafiliasi.
- Headline* : utama, berita utama, bahasan utama
- Hegemoni* : bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral yang dilakukan dengan konsensus
- Idem* : sama dengan yang disebutkan di atas atau di muka
- Imperialisme* : ideologi dari negara yang hendak memperbesar daerah jajahan untuk kepentingan ekonomi
- Independent* : independen atau mandiri
- Intens* : sangat bergelora, bersemangat, tinggi mutu, berkobar-kobar.
- Intensifir* : Melakukan intensifikasi atau pelaku intensifitas
- International Cooperative Alliance* : aliansi organisasi internasional
- Karyawan* : istilah baru untuk mendefinisikan pekerja. Istilah ini juga dijadikan kampanye anti istilah buruh. Terminologinya mengacu pada “orang yang berkarya”
- Karyawanisme* : suatu ideologi yang pada mulanya dikampanyekan oleh SOKSI dan orang-orang Sekber Golkar dalam menandingi ideology perjuangan kelas milik SOBSI. Karyawanisme menolak kontradiksi antarkelas dan mendukung hubungan asas kekeluargaan yang memandang pekerja-pemilik modal adalah sebagai mitra pembangunan
- Kaum Marhaen* : suatu kelas sosial yang digambarkan oleh Sukarno mempunyai tanah sendiri, alat

- produksi sendiri dan hasilnya untuk kebutuhan dirinya sendiri
- Kaum Trotskies* : kelompok penganut ajaran Leon Trotsky yang merupakan oposisi dalam tubuh Marxisme. Ideologi ini berbeda dengan ajaran Marxisme fundamental karena mengklaim lebih menghargai prosedur demokratis dan hak-hak asasi manusia.
- Kolonialisme* : Teori dan praktik kolonisasi, yaitu pembentukan sebuah ‘koloni’ dengan pengumpulan masyarakat daerahnya untuk menduduki daerah baru dengan tetap mempertahankan kehidupan sosial daerah asalnya.
- Fasisme* : suatu ideologi yang tumbuh dari latar nasionalisme untuk membangun pemerintahan otoriter
- Feodalisme* : sistem dalam ketatanegaraan meliputi politik secara khas, ketentaraan, struktur ekonomi, dan tatanan sosial. Dapat juga berarti bentuk sosio-ekonomis dengan pola hubungan tuan-hamba yang mengizinkan sistem pemilihan budak dan penumpukan kekayaan . Sistem feodalisme ini bermacam bentuk tergantung tempat dan bangsa, tetapi mempunyai ciri khas yang sama, yakni, alat utama produksi (yakni tanah) berada dalam genggaman dan kekuasaan kelompok tuan-tuan feodal yang berkuasa, yang nyaris seluruhnya bergabung dengan negara.
- Kendor* : lengah, lemas, tidak bersemangat
- Kerja-hegemonik* : aktifitas kerja untuk menguasai kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual
- Kolusi* : bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara illegal (melanggar hukum) untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka
- Komprehensif* : secara kompleks, menyeluruh

<i>Komune</i>	: kelompok-kelompok dalam masyarakat
<i>Konflik Manajerial</i>	: konflik yang terjadi dalam tubuh manajer atau pengorganisir suatu lembaga
<i>Konformitas</i>	: (dalam konteks politik) yang berarti penyesuaian atas kesepakatan yang telah dibuat
<i>Konsensus</i>	: usaha untuk membuat kesepakatan yang disetujui bersama-sama
<i>Kontradiksi Diktum</i>	: pertentangan dua istilah yang mempunyai makna yang sama
<i>Kontrarevolusi</i>	: julukan dari orang-orang Sukarno terhadap kelompok yang menghambat jalannya revolusi
<i>Korupsi</i>	: tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan
<i>Kronologis</i>	: suatu proses yang runtut berdasarkan waktu kejadian
<i>Landreform</i>	: reformasi agraria
<i>Majelis</i>	: badan musyawarah
<i>Manipol</i>	: manifestasi politik, dalam konteks ini adalah gagasan dan ajaran Sukarno
<i>Marhaenisme</i>	: ideologi yang didirikan oleh Sukarno pada 1927, berdasarkan nama Marhaen, petani miskin di sekitar Bandung yang harus dibela hak-haknya secara politik. Dalam istilah ini Sukarno mengarahkan ideologinya pada dua hal yaitu; sosio-nasionalisme yang mencakup kebangsaan di atas kemanusiaan, dan sosio-demokrasi yang berdiri di atas kepribadian nasional berciri gotong-royong.
<i>Marxist</i>	: para penganut ajaran Karl Marx
<i>Marxism</i>	: ideologi Karl Marx yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial, politik
<i>Marxisme Fundamental</i>	: ideologi Karl Marx yang baku dan mendasar

yang menolak pembaharuan dari teori dasar

- Marxisme Revisionisme* : ideologi alternatif dari Karl Marx yang merupakan hasil revisi Marxisme
- Masyarakat Sosialis* : suatu masyarakat yang memiliki dan mengedepankan tujuan bersama daripada tujuan pribadi
- Media Mainstream* : media yang pemberitaannya mengikuti trend yang terjadi dalam masyarakat
- Membunuh atau Dibunuh* : salah satu istilah kampanye yang muncul dalam konflik politik peristiwa 1965 di daerah-daerah.
- Mismanagement* : kesalahan atau tidak tercapainya tujuan dalam urusan mengatur / manajemen
- Mukaddimah* : bagian pembukaan dari suatu aturan
- Nasakomisasi* : kegiatan kampanye ideology nasional, agama dan komunis (nasakom) ke dinas atau instansi-instansi negara pada masa Demokrasi Terpimpin
- Nasionalisasi* : kegiatan pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing menjadi milik pemerintah Indonesia
- Nasionalisme* : suatu ideologi yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mengutamakan kepentingan nasional
- Negara Integral* : istilah dari Antonio Gramsci yang berarti kesatuan negara yang dikuasai oleh masyarakat politik dan masyarakat sipil dengan konsensus
- Nepotisme* : pemilihan atau penunjukan orang/individu bukan atas dasar kemampuannya, melainkan atas dasar hubungan kekeluargaan
- Non-afiliasi* : dalam konteks organisasi yang berarti tidak bagian dari struktur internal partai maupun simpatisan partai

<i>Non-Governmental</i>	: mengacu pada organisasi de-sentral, atau istilah bagi organisasi yang bersifat mandiri dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah
<i>Onderbouw</i>	: basis massa atau sayap pendukung dari sebuah organisasi
<i>Organisasi Teritorial</i>	: dalam konteks militer yaitu satuan organisasi yang ditempatkan di daerah-daerah tertentu sesuai dengan misi yang ingin dicapai
<i>Pantja Program Front Nasional</i>	: lima program lembaga front nasional
<i>Panji-panji</i>	: bendera, jargon, tanda kebesaran
<i>Pekerja</i>	: istilah lainnya bagi orang yang bekerja
<i>Pengganyangan</i>	: penghancuran
<i>Perjuangan Kelas</i>	: salah satu isi dari ideologi komunis yaitu suatu interpretasi hubungan industrial yang menempatkan buruh sebagai kelas sosial yang tertindas oleh majikan dan diharuskan untuk berjuang dan melawan ketidakadilan sosial
<i>Piagam Pernyataan Dasar Karyawan</i>	: piagam yang dirumuskan organisasi independen dengan organisasi militer pada tahun 1964
<i>Polarisasi</i>	: dalam konteks sosial politik yang berarti pembagian atas dua bagian yang berlawanan
<i>Political Society</i>	: masyarakat politik yang merujuk pada hubungan-hubungan yang terwujud dalam berbagai lembaga negara
<i>Principle</i>	: prinsip atau suatu gagasan yang menjadi acuan individu atau kelompok
<i>Progresif-revolusioner</i>	: dalam konteks politik yang mengarah pada kemajuan atau berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang
<i>Proletar</i>	: kaum yang tertindas yang tidak punya tanah dan alat produksi
<i>Propagandis</i>	: penyebar propaganda

<i>Quorum</i>	: ukuran jumlah anggota yang dianggap mewakili keseluruhan
<i>Reaksioner</i>	: dalam konteks politik berarti para pelaku dari sikap politik warga negara yang serba aktif dan reaktif terhadap suatu keadaan
<i>Reshuffle</i>	: yang sering digunakan dalam penggantian individu atau perombakan kelompok dalam kabinet
<i>Respons</i>	: dalam konteks psikologi yang berarti reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra
<i>Retooling</i>	: pencopotan dan penggantian aparat negara yang tidak sehaluan dengan pemerintah
<i>Rigid</i>	: (mengacu pada aturan) yang bersifat rinci, kaku dan detail
<i>Sentral</i>	: pusat, terpusat
<i>Sentralisme</i>	: metode kepemimpinan lembaga yang terpusat
<i>Sentralisme Demokratik</i>	: istilah lain untuk menjelaskan ideologi Demokrasi Terpimpin, yaitu suatu kepemimpinan demokratis yang terpusat
<i>Serikat</i>	: kelompok organisasi
<i>Serikat bentukan militer</i>	: serikat buruh yang dibentuk oleh militer untuk menandingi dominasi serikat-serikat buruh komunis
<i>Serikat Buruh Horizontal</i>	: dalam konteks kelembagaan, yaitu serikat buruh yang mempunyai basis massa dari serikat-serikat kecil berbeda jenis lapangan pekerjaan dan dipimpin dengan struktur yang horizontal
<i>Serikat independen</i>	: serikat buruh yang tidak menjadi afiliasi dari partai politik maupun militer
<i>Serikat Kerja Partikelir</i>	: serikat-serikat buruh kecil yang tidak mempunyai induk-sentral
<i>Serikat Buruh Vertikal</i>	: dalam konteks kelembagaan yaitu serikat

buruh yang mempunyai basis massa dan cabang anggota dari serikat-serikat yang sejenis dan dipimpin dengan struktur yang vertikal

- Socialism* : ideologi yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi
- Soverenitas* : berasal dari kata *sovereign* yang berarti kedaulatan
- Staat van Oorlog en Beleg (S.O.B)* : Statuta Hindia Belanda yang menjadi Peraturan Negara dalam Bahaya dan Perang. Aturan ini memberi kekuasaan kepada Militer untuk mengambil suatu tindakan dalam keadaan darurat yang memaksa, apa pun dan bagaimana pun caranya. SOB diperoleh militer pada saat bertugas menghadapi gerakan PRRI-Permesta.
- Status Quo Oriented* : (dalam konteks politik) istilah bagi partai-partai yang hanya berorientasi untuk mempertahankan kekuasaan semata
- Stigmatisasi* : aktivitas pemberian “label/tanda” bagi seseorang atau kelompok tertentu di masyarakat dengan memberi nilai tertentu yang berbeda dari nilai umum
- Substratum of Agreement* : suatu dasar persetujuan dalam tatanan sosial yang teratur
- Subversif* : suatu usaha pemberontakan dalam merobohkan struktur kekuasaan termasuk negara
- Sukarnoisme* : ideologi dari ajaran Sukarno
- Sukarnoism to kill Sukarno* : istilah yang muncul dari orang-orang Sukarno yang merespon pembentukan Badan Pendukung Sukarno (BPS) yang didominasi oleh orang-orang dari Partai Murba
- Supersemar* : Surat Perintah Sebelas Maret yang ditandatangani oleh Sukarno yang memberi mandat kepada Suharto untuk menertibkan

keamanan. Dalam perjalanannya legitimasi surat ini dijadikan titik tolak penyerahan kekuasaan

- Swatantra* : adalah daerah-daerah yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Daerah-daerah swatantra ini menjadi syarat minimal bagi kekuasaan golongan karya / non parpol agar dapat menjadi anggota Front Nasional (FN)
- Sweeping* : (dalam konteks politik) yaitu kegiatan pembersihan suatu unsur dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah unsur komunis pada masa pasca peristiwa 1965
- Tarbiyah Islamiyah* : ideologi yang berbasis spiritual dari Partai Perti. Ideologi ini memakai pendidikan untuk menyebarkan ajaran spiritual
- Theosentris* : menempatkan Tuhan sebagai dasar dari segala orientasi / persepektif
- Think-Tank* : individu atau kelompok yang menjadi tempat berpikir bagi suatu tujuan tertentu atau untuk misi tertentu
- Totalitarianisme* : sistem pemerintahan yang diselenggarakan dengan kekuasaan penuh dan mutlak atas semua sendi kehidupan, lantas menyingkirkan siapapun yang tidak patuh atau tidak sejalan dengan garis politiknya.
- To the point* : secara langsung, tertuju pada poin atau maksud utama
- Tujuh Setan Desa* : istilah resmi hasil dari penelitian PKI terhadap kondisi desa dan masalah yang menghambatnya yang terdiri dari tujuh unsur yaitu; tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kabir (kapitalis birokrat) atau pegawai negeri yang korup, tengkulak jahat, bandit desa dan penguasa jahat yang membela kepentingan kaum pengisap desa.
- Unionisme* : (dalam konteks kelembagaan) yang berarti



	kesatuan organisasi
<i>Unitaris</i>	: dalam konteks kelembagaan, berarti suatu lembaga/organisasi yang manajemennya berdasarkan pada prinsip kesatuan
<i>Upah</i>	: gaji yang diterima buruh dari majikan
<i>Urgensi</i>	: kondisi yang urgen
<i>Vaksentrale</i>	: (dalam konteks kelembagaan) suatu bentuk organisasi perhimpunan dari berbagai organisasi
<i>Vertikalisasi</i>	: proses pemusatan kelompok-kelompok dalam organisasi agar berada dalam satu komando terpusat
<i>Voting</i>	: perhitungan suara dimana satu individu mempunyai satu suara
<i>White Collar</i>	: istilah bagi buruh halus atau pegawai yang bekerja di dinas, instansi, dan kantor yang mempunyai keahlian khusus
<i>Working Party on Indonesia</i>	: nama pertemuan antarorganisasi asing dan domestik untuk membantu perserikatan buruh di Indonesia pada awal Orde Baru

## DAFTAR TABEL

- 2.1 Daftar Serikat Buruh Orientasi Partai Politik sampai akhir Demokrasi Terpinpin
- 4.2 Daftar Peserta Musyawarah Perserikatan Buruh
- 5.3 Daftar Pengurus Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)

## DAFTAR LAMPIRAN

- A Azas dan Tujuan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI)
- B Daftar nama serikat-serikat buruh lokal di seluruh Indonesia yang lahir setelah kemerdekaan hingga pada tahun 1949
- C Daftar Serikat Buruh dari segala tingkatan yang bergabung dalam Front Nasional (FN)
- D Daftar Serikat Buruh dari segala Tingkatan yang bergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)
- E Daftar Serikat-Serikat Buruh Vaksentral yang terdaftar dalam Departemen Tenaga Kerja hingga tahun 1967
- F Surat asli dari Harry Goldberg kepada Agus Sudono
- G Lembar Pernyataaan Bersama Perserikatan Buruh tanggal 25 Oktober 1968
- H Hasil sidang pleno MPBI berupa Peraturan Dasar MPBI
- I “Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia”, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Seluruh Indonesia (DPP-FBSI), Jakarta, 20 Februari 1973, (Inventaris Arsip FBSI: Arsip Nasional Republik Indonesia).
- J Badan Pimpinan Harian Sementara, Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), *Pernyataan Dukungan*, Jakarta, 20 Maret 1973, tertanda tangan Drs. Radjudin Jusuf, (Inventaris Arsip FBSI: Arsip Nasional Republik Indonesia).
- K Badan Pimpinan Harian Sementara, Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), *Surat Pernyataan*, Jakarta, 20 Maret 1973, tertanda tangan Rasjid Sutan Radjamas, (Inventaris Arsip FBSI: Arsip Nasional Republik Indonesia).
- L “Naskah Timbang Terima”, antara Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) dengan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Seluruh Indonesia (DPP-FBSI), Jakarta, 26 Maret 1973, (Inventaris Katalog FBSI: Arsip Nasional Republik Indonesia).
- M Surat asli dari lembaga asing kepada Agus Sudono

N Lembar Pernyataan Bersama, Deklarasi Perjuangan Buruh Indonesia

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI): Media Konsensus Perserikatan Buruh dan Pemerintah Orde Baru tahun 1968 - 1973”. Melalui metode sejarah, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah pembentukan dan perkembangan badan yudikatif dalam perserikatan buruh nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan kesepakatan hegemonik pemerintah Orde Baru dengan serikat-serikat buruh tingkat nasional pasca dihancurkannya organisasi buruh beraliran komunis. Tercapainya mufakat untuk membentuk suatu “majelis” dalam pertemuan informal antara serikat-serikat buruh nasional dengan pemerintah pada tahun 1968, disebabkan masih terdapat serikat buruh dengan aliran dan ideologi perjuangan masing-masing yaitu; serikat buruh afiliasi partai politik, serikat buruh bentukan militer, dan serikat-serikat independen. Ketiga kekuatan utama tersebut adalah keanggotaan MPBI yang berjumlah 21 serikat-serikat buruh nasional dan merupakan bekas peninggalan kontestasi politik sejak periode setelah kemerdekaan.

Pasca peristiwa 1965, lahir kebencian komunal, penghancuran berdarah dan pembersihan terstruktur terhadap semua organisasi buruh bertendensi perjuangan kelas, terutama serikat-serikat buruh beraliran komunis. Bencana kemanusiaan ini memulai periode transisi kepemimpinan nasional serta mengubah tatanan kelembagaan perserikatan buruh. Pemerintahan baru yang terdiri dari aliansi militer dan sipil anti komunis mulai mengadakan konsensus perburuhan dengan mengundang federasi-federasi buruh nasional. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan membentuk MPBI sebagai media penghubung. Melalui MPBI, pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja menginstruksikan federasi buruh nasional untuk merumuskan pembentukan wadah perjuangan buruh dalam sidang pleno MPBI tahun 1969. Depnaker yang bekerjasama dengan organisasi luar negeri antikomunis, juga mengadakan seminar indoktriner melalui MPBI untuk mendukung Orde Baru dengan tema produktivitas nasional dan pembaharuan/penyederhanaan gerakan buruh. Kegiatan ini didukung oleh serikat-serikat buruh bentukan militer sebagai lembaga yang dominan dalam setiap forum sidang MPBI.

Dalam perkembangannya, MPBI yang semula dicita-citakan membentuk wadah perjuangan buruh yang dapat mempersatukan gerakan buruh dengan “masih menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing” mulai lemah eksistensinya karena semua keanggotaan PNS dalam tubuh MPBI telah diorganisir dalam suatu korps karyawan menjelang Pemilu 1971. Badan MPBI juga mengalami kemunduran karena pertentangan panjang dalam forum, ketergantungan tempat dan dana keuangan serta ketidakmampuan MPBI dalam mengurus persoalan buruh membuat badan ini kemudian sepenuhnya tidak berfungsi. Di luar dari keputusan resmi MPBI dan berdasarkan instruksi badan intelijen, secara sepihak telah dibentuk organisasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian secara tak terelakkan dilakukan peleburan resmi badan MPBI kedalam tubuh FBSI yang merupakan badan yang diagendakan pemerintah untuk bersifat sebagai badan induk serikat buruh “satu-satunya” di Indonesia.

## ***ABSTRACT***

This thesis is entitled "Indonesian Workers' Consultative Assembly (MPBI): Labor Consensus Media and the New Order Government in 1968 - 1973". Through the historical method, the problem examined in this thesis is the formation and development of a judicial body in the national labor union. This body was formed based on the New Order government's hegemonic agreement with national-level trade unions after the destruction of communist-based labor organizations. The achievement of consensus to form an "assembly" in informal meetings between national trade unions and the government in 1968 was due to the existence of trade unions with their respective streams and ideologies of struggle, namely; trade unions affiliated with political parties, unions formed by the military, and independent unions. The three main strengths are MPBI membership, which amounts to 21 national trade unions and is a former legacy of political contestation since the period after independence.

After the events of 1965, there was communal hatred, bloody destruction and structured cleansing of all labor organizations with a tendency to class struggle, especially communist-style trade unions. This humanitarian disaster began the transition period of national leadership and changed the institutional arrangements of labor unions. The new government, consisting of anti-communist military and civilian alliances, began holding a labor consensus by inviting national labor federations. The strategy is to form MPBI as a liaison medium. Through MPBI, the government through the Ministry of Manpower instructed the national labor federation to formulate a forum for workers' struggle in the 1969 MPBI plenary session. The Ministry of Manpower which cooperated with anti-communist foreign organizations also held indoctriner seminars through MPBI to support the New Order with the theme of national productivity and renewal / simplification of the labor movement. This activity is supported by trade unions formed by the military as the dominant institution in every MPBI meeting forum.

In its development, MPBI which was originally aspired to form a container of workers' struggle that can unite the labor movement by "still upholding each other's sovereignty" began to weaken its existence because all PNS membership in the MPBI body had been organized in an employee corps ahead of the 1971. Election. also suffered a setback due to long contradictions in the forum, dependence on places and financial funds as well as the inability of MPBI to deal with labor issues which made this body completely dysfunctional. Apart from the official decision of the MPBI and based on the instructions of the intelligence agency, the All Indonesia Workers' Federation (FBSI) unilaterally formed which inevitably carried out the official merger of the MPBI body into the body of the FBSI which is the agency scheduled by the government to act as a trade union parent body "the only one" in Indonesia.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Gerakan buruh Indonesia adalah suatu bagian penting dari gerakan kebangsaan. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, membuat para buruh Indonesia di kantor pemerintah, jawatan dan perusahaan juga di pabrik swasta milik Jepang untuk membentuk organisasi-organisasi perjuangan dengan maksud mengambil alih dinas-dinas dan menyatakannya sebagai milik republik. Sebagian usaha ini ditempuh dengan perlawanan. Segenap pemimpin serikat buruh menyadari betapa pentingnya perjuangan kemerdekaan yang membuat sejumlah perwakilan buruh berkumpul pada tanggal 19 September 1945 untuk mendiskusikan peranan buruh dalam pendirian Republik dengan membentuk organisasi Barisan Buruh Indonesia (BBI).<sup>2</sup>

Semangat kemerdekaan telah mendorong kaum buruh untuk membentuk organisasi. Selama tahun 1946-1947 banyak serikat buruh lahir, yaitu: Serikat Buruh Gula (SBG) tahun 1946, Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) tahun 1946, Serikat Buruh Percetakan (SBPI) tahun 1946, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) tahun 1947, Serikat Buruh Kementerian Perburuhan (SB KEMPERBU) tahun 1947, Serikat Buruh Daerah Autonom (SEBDA) tahun 1947, Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN) tahun 1947, Serikat Buruh Kementerian Penerangan (SB KEMPEN) tahun 1947, Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) tahun 1950 dan masih banyak lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Iskandar Tedjasukmana, *Watak Politik Gerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Penerbit TURC, 2008), hlm. 31.

<sup>3</sup>*Serikat Buruh Jang Teraftar* oleh Kementerian Perburuhan (Jakarta, 1956), dalam Tedjasukmana, *Watak Politik*, hlm. 36.

Perpecahan dan perselisihan sering terjadi dalam tubuh federasi buruh. Federasi buruh merupakan badan organisasi yang berbentuk gabungan dari organisasi-organisasi dalam satu badan. Pengindukan ini didasari dengan berbagai macam alasan yaitu; aliran atau ideologi yang sama, lokasi perusahaan, atau bidang yang sama dalam perusahaan. Dalam konteks kelembagaan, organisasi buruh dengan tingkatan terkecil merupakan serikat-serikat buruh tingkat perusahaan dengan jenis yang sesuai dalam bidang perusahaan dan hanya berada di dalam perusahaan itu. Sebagian besar serikat-serikat buruh tingkat perusahaan mempunyai induk organisasi yang berbentuk federasi. Sedangkan dalam tingkatan terbesar berbentuk konfederasi yaitu berbentuk induk dari federasi-federasi buruh.

Sentral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI) yang merupakan hasil dari bergabungnya GASBI dan GASBV harus mengalami perpecahan internal, karena beberapa anggota terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948. Ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan sikap terhadap Persetujuan Renville juga membuat internal SOBSI mengalami perpecahan dengan berdirinya organisasi buruh lainnya, yaitu: Perhimpunan Organisasi Buruh (POB) pada tahun 1948, Ikatan Central Organisasi Serikat-Serikat Sekerdja (ICOSS) pada tahun 1948, Gabungan Serikat Buruh Revolusioner (GASBRI) pada tahun 1949. POB dan ICOSS melakukan fusi menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) pada tahun 1948 yang kemudian dipegang perannya oleh Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HISSBI) yang merupakan *Panitia Koordinasi* dari induk-induk serikat buruh.<sup>4</sup>

Upaya mempersatukan kembali organisasi buruh terus dilakukan tetapi tidak berlangsung lama karena perbedaan ideologi dan cara kerja. Hingga menjelang pemilu legislatif 1955, kembali bermunculan banyak organisasi buruh, yaitu: Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) tahun 1948, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) tahun 1951, (HISSBI-baru) tahun 1952, Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) tahun 1952, Kongres Buruh Seluruh

---

<sup>4</sup>Lihat Sandra, *Sejarah Pergerakan*, hlm. 71 dan 90; Tedjasukmana, *Watak Politik*, hlm. 37-39.



Indonesia (KBSI) tahun 1953, Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) tahun 1955, Gerakan Organisasi Buruh Serikat Islam (GOBSI) tahun 1955, Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM) tahun 1956, Sentral Organisasi Buruh Pancasila (SOB PANCASILA) tahun 1957, Persatuan Organisasi Buruh Islam Seluruh Indonesia (PORBISI) tahun 1958.<sup>5</sup>

Pada tahun 1956, corak pergerakan buruh tampak pada persaingan ideologi dan aliran-aliran dalam partai politik, terutama ideologi Islam, Nasionalisme, Sosialisme dan Komunisme. Di tingkat nasional muncul ketegangan kehidupan politik ketika terjadi keretakan dalam tubuh kabinet, hingga pada bulan April tahun 1957 terbentuk Kabinet Karya. Programnya yang berkaitan dengan perburuhan adalah usaha pembebasan Irian Barat. Aksi pembebasan Irian Barat dipimpin oleh pemerintah dibantu oleh militer dan berbagai organisasi pemuda, wanita, buruh, petani, ulama, veteran, dll. Pada bulan November 1957 dibentuk Badan Kerjasama Buruh-Militer (BKS Bu-Mil) yang berfungsi dalam perjuangan fisik. Aksi pemerintah melalui Menteri Penerangan Soedibjo menginstruksikan kepada segenap buruh yang bekerja di perusahaan Belanda untuk mengadakan aksi mogok total pada tanggal 2 Desember 1957. Aksi berlanjut hingga pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda di daerah-daerah. Pada tanggal 10 Februari 1958 sebagai kesatuan gerak rakyat dibentuklah Front Pembebasan Irian Barat.<sup>6</sup>

Pada bulan Juli 1959, presiden mengeluarkan Dekrit Presiden dan pada pertengahan tahun 1959 terbentuklah Koordinasi Buruh Indonesia (KOBI)<sup>7</sup> yaitu badan koordinasi untuk menghubungkan serikat lokal dan induknya, dan juga melakukan pendidikan kepada serikat untuk mengembangkan organisasi. Pada tahun 1964 melalui Keppres No. 193/1964, Presiden menginstruksikan untuk

---

<sup>5</sup>M.S. Hidajat, *Seabad Gerakan Buruh Indonesia* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 129; Lihat juga Sandra, *Sejarah Pergerakan*, hlm. 67-68, 99-112; Tedjasukmana, *Watak Politik*, hlm. 38-39, 43-44.

<sup>6</sup>Sandra, *Sejarah Pergerakan*, hlm. 113-116.

<sup>7</sup>Sandra, *Sejarah Pergerakan*, hlm. 121.

membentuk Front Nasional yang terdiri atas golongan fungsional yang bertujuan untuk melaksanakan cita-cita negara. Dewan/Front Nasional terdiri atas 7 angkatan, salah satunya adalah “Angkatan Buruh/Pegawai”. Dalam hal ini, Presiden menginstruksikan agar organisasi yang berada di dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partai politik atau bergabung membentuk organisasi.<sup>8</sup>

Organisasi-organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik pada masa ini, oleh militer/ABRI dikembangkan konsep “kekaryaan” sebagai antitesis dari praktik-praktik politik kepartaian yang dianggap penuh pertarungan dan konflik, kemudian pada tanggal 20 Oktober 1964 dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).<sup>9</sup>

Tercatat dalam Sekber Golkar, 61 organisasi fungsional non-afiliasi bergabung, yang salah satunya adalah militer dalam hal ini adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Seiring dengan meningkatnya pengaruh PKI, pada tahun 1960an pihak militer meningkatkan pengaruhnya terhadap organisasi massa dengan mensponsori berdirinya; Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) yang semuanya dipimpin oleh militer.<sup>10</sup>

Berdirinya Sekber Golkar, menjadikan militer memiliki akses yang cukup luas terhadap gerakan massa sehingga mampu mengimbangi mobilisasi partai politik, khususnya PKI. Dalam berbagai hal, militer dan PKI sering terjadi konflik pada tingkat ormas-ormas. Misalnya, saat *Peristiwa Bandar Betsy* pada tahun 1965, ketika aktivis SOKSI berhadapan dengan massa Sarbupri/BTI.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 14.

<sup>9</sup> Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS, 1981), hlm. 199.

<sup>10</sup>Suryadinata, *Golkar*, hlm 22-23.

<sup>11</sup>Burhan D. Magenda, *Golkar dan Sistem Kepartaian Orde Baru dalam Demitologisasi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, (Jakarta: CIDES, 1998), hlm. 112.

Pada 1960-an di tingkat nasional, tercatat beberapa organisasi buruh lahir karena kepentingan politik dan konflik antar-penguasa, yaitu: Kesatuan Karyawan Buruh - Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (KEKARBU-MKGR) tahun 1960, Kesatuan Organisasi Buruh Pancasila (KUBU PANCASILA) tahun 1961, Serikat Organisasi Karyawan Sosialis/Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) tahun 1961, Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (KESPEKRI) tahun 1963, Ikatan Karyawan Muhammadiyah (IKM) tahun 1965 dan serikat-serikat non-federatif lainnya.<sup>12</sup>

Konflik antara pihak komunis dan militer memuncak dengan terjadinya peristiwa “Gerakan 30 September 1965 (G30S/1965)” yang membuat suasana perburuhan menjadi sunyi dan mencekam. Buruh yang terlibat dan dituduh terlibat dalam gerakan dikejar, ditangkap lalu dipenjara, serta dibunuh dengan tanpa melalui proses pengadilan. Sementara itu, pihak militer terus mengendalikan dan mengorganisasikan massa lainnya untuk mengejar pihak-pihak yang terlibat atau dekat pada unsur komunis.

Penghancuran PKI dan orang-orangnya berujung pada peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto dengan “*Supersemar*”nya pada tahun 1966. Pada masa ini, segala hal yang berhubungan dengan gerakan komunis dihancurkan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan militer di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pemerintahan yang baru membuat istilah “Orde” yang dikotomis, yaitu “Orde Lama” yaitu sistem pemerintahan pada era kepemimpinan Soekarno yang dianggap penuh konflik politik dan krisis ekonomi, digantikan dengan “Orde Baru”<sup>13</sup>, yang menghendaki suatu tata pikir pemerintahan yang lebih realistis dan pragmatis. Pengertian Orde Baru ini merujuk pada usaha desukarnoisasi dan mengupayakan bentuk sistem pemerintahan yang bertujuan

---

<sup>12</sup>Hidajat, *Seabad*, hlm. 130 dan 137.

<sup>13</sup>Pernyataan “Orde Baru” bermula dalam Seminar II Angkatan Darat di Bandung pada 25 – 31 Agustus 1966, Ramadhan K.H., *Soeharto: Ucapan, Pikiran dan Tindakan Saya* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1988), hlm. 37.

membangun tatanan baru pemerintahan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 “secara murni dan konsekuen”.

Pada awal Orde Baru, kondisi perburuhan Indonesia mengalami *degradasi* semangat perjuangan politik. Hal ini disebabkan sebagian besar buruh dan serikat buruh dianggap terlibat dalam G-30-S dan sebagian dari kalangan buruh berpaham komunis, sehingga ketakutan, kecemasan, kekhawatiran senantiasa dirasakan oleh semua kalangan buruh. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah mengambil tindakan-tindakan untuk menjaga stabilitas negara dan mengantisipasi kemunculan komunisme, dengan cara memberantas dan menghancurkan segala hal yang berhubungan dengan komunisme baik partai, ormas, *onderbouw*, badan pendukung serta individu yang berpaham komunis lainnya.<sup>14</sup> Segala macam yang berhubungan dengan komunisme ditumpas habis oleh pemerintah sampai ke akar-akarnya.<sup>15</sup> Pada kondisi demikian terjadi penguasaan kelas buruh oleh pemerintah dengan menggunakan cara intelektual atau kepemimpinan moral. Kondisi yang demikian disebut dengan *hegemoni*. Yaitu sebuah penguasaan dominasi kelas sosial dengan tidak menggunakan penindasan kekerasan melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis dengan menggunakan media konsensus yaitu Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Republik Indonesia (MPRS) No. : XXV/MPRS/1966 Tentang: Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme* dalam Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-2002 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002)

<sup>15</sup> Tidak hanya pembunuhan massal orang-orang komunis dan yang dituduh komunis di daerah-daerah, melainkan di dalam tubuh Sekber Golkar, orang-orang yang dirasa memiliki kedekatan dengan Soekarno disingkirkan, termasuk dalam militer sekalipun. Lihat Suhardinata, *Golkar*, hlm 29.

<sup>16</sup> Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm 19.

Buruh yang merupakan kelas sosial yang ter-hegemoni terjadi sebagai bagian dari aktivitas negara (yang sudah didominasi oleh kelas sosial) untuk merangkul kelas sosial lain sebagai upaya agar menilai dan memandang permasalahan sosial dalam kerangka yang sudah ditentukan.<sup>17</sup> Pada penelitian ini, kelas sosial yang dominan dalam negara yaitu militer ingin mempertahankan kekuasaan yang sudah direbutnya dari pihak dominasi komunis, sehingga mereka harus melakukan konsolidasi dengan kelas sosial lain, dalam hal ini adalah kaum buruh yang telah kalah secara ideologis.

Buruh mengalami hegemoni yang mengacu pada pemusatan ideologi terpusat yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang diwajibkan menjadi “kebenaran tunggal” oleh kelompok/kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya<sup>18</sup>, dalam hal ini adalah Militer. MPBI dalam perjalanannya, ternyata tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus perburuhan yang ada. MPBI hanya berkuat pada kalangan elitis semata dan dua tahun setelah peresmiannya, yaitu pada tahun 1971, terjadi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang pertama pada masa Orde Baru yang diikuti oleh 9 Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar). Pemakluman MPBI dan Sekber Golkar menjelang Pemilihan Umum menjadi sangat jelas sekali arah aspirasi politiknya untuk ditujukan pada salah satu peserta pemilu.<sup>19</sup>

Gagasan untuk membentuk suatu majelis datang dari Departemen Tenaga Kerja yang telah bebas dari segala unsur komunis dan gagasan perjuangan kelas. Pada tahun 1968, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja, Laksda L Mursalin Daeng, mengadakan pertemuan dengan 9 vaksentral buruh yang tergabung dalam

---

<sup>17</sup>Nezar Patria & Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 118-119.

<sup>18</sup>Richard Bellamy, *Modern Italian Social Theory, From Pareto to the Present*, 1987 terjemahan Vedi. R. Hadiz, *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 185.

<sup>19</sup>Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 30.

Sekretariat Bersama Buruh (Sekber Buruh), yang terdiri atas; KBM, SARBUMUSI, GOBSI-Indonesia, GASBIINDO, SOB PANCASILA, KESPEKRI, KUBU PANCASILA, KONGKARBU-SOKSI, dan Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM).<sup>20</sup>

Pertemuan yang diadakan pada tanggal 20 Juni 1968 oleh pemerintah membahas kondisi perburuhan dan berupaya untuk mempersatukan organisasi buruh. Pada tanggal 25 Oktober 1968, 21 serikat buruh mengeluarkan ikrar bersama untuk menyetujui gagasan menteri. Pada tanggal 1 November 1969 Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang merupakan medium strategi pemerintah untuk menggabungkan federasi-federasi buruh menjadi satu komando diresmikan oleh Presiden Soeharto di Istana Merdeka.<sup>21</sup>

Perihal inilah yang menjadi kajian penelitian penulis, yaitu mengenai terbentuknya MPBI, aktivitasnya dan kemundurannya selaku media konsensus pemerintah untuk menyatukan organisasi perburuhan melalui aktivitas yang hegemonik, dengan membentuk MPBI. Dasar inilah yang menyebabkan kaum buruh dipersatukan untuk dijauhkan dari segala bentuk atribut-atribut politis dan pertarungan-pertarungan ideologis, diserang secara intelektual melalui konsensus agar sama dalam melihat masalah perburuhan, gaji swasta dinaikkan untuk meredakan upaya pemogokan dan pemerintah menyiapkan tenaga buruh untuk memasuki industri-industri swasta Jepang dalam mendukung Pembangunan Nasional.<sup>22</sup> Semuanya dalam format “Cinta Kerja” dan “Cinta Pembangunan”<sup>23</sup>,

---

<sup>20</sup>Hidajat, *Seabad Gerakan*, hlm. 138.

<sup>21</sup>“Buruh Sama Pentingnja Dengan Unsur2 Modal Dan Peralatan: Penegasan Presiden Dalam Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Buruh Indonesia”, *Suara Merdeka*, 03 November 1969.

<sup>22</sup>“Pengusaha-pengusaha Djepang tawarkan pekerdjaan bagi tenaga2 buruh Indonesia: Menteri Mursalim setjara pribadi setudju”, *Kompas*, 02 Oktober 1968.

<sup>23</sup>“Buruh Sama Pentingnya Dengan Unsur2 Modal dan Peralatan: Penegasan Presiden Dalam Sidang Pertama Madjelis Permusyawaratan Buruh Indonesia”, *Suara Merdeka*, 03 November 1969.

seperti sambutan Presiden Soeharto di Istana Merdeka pada saat meresmikan MPBI.

Sesuai dengan namanya, “Majelis”, mempunyai fungsi sebagai badan konsultasi yang terdiri atas organisasi-organisasi buruh untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan perburuhan.<sup>24</sup> Namun demikian, pada kenyataannya arah pergerakan MPBI menjadi “mendua”, karena harus berjalan di bawah kontrol atau hegemoni pemerintah. Kasus-kasus perburuhan tidak dapat diselesaikan, terjadi krisis kepemimpinan, dan ketidakjelasan cara kerja sehingga para pemimpin organisasi buruh melakukan pertemuan pada bulan Oktober 1971 untuk kembali merumuskan “Penyederhanaan Organisasi Buruh” yang dipimpin oleh Letjen Ali Murtopo dan pada bulan Mei 1972 MPBI diinstruksikan untuk menghadap Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) agar sama dalam sudut pandang, sehingga diadakanlah Sidang Pleno MPBI dengan mengeluarkan Ikrar Bersama untuk pembentukan (Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).<sup>25</sup> Pembentukan FBSI ini menjadi dasar bagi kemunduran MPBI sebagai media konsensus dan mengawali hadirnya serikat buruh dengan tatanan baru yang berorientasi ekonomi dan hilangnya gagasan politik-ideologi dari serikat-serikat buruh. Lembaga FBSI ini diproyeksikan oleh pemerintah untuk menjadi organisasi buruh tunggal yang menampung anggota serikat buruh dari jenis lapangan pekerjaan dan menghilangkan organisasi-organisasi buruh lainnya yang pernah besar pada masa sebelumnya.

Penelitian Skripsi sebelumnya tentang MPBI belum pernah ada. Buku-buku yang terbit tentang MPBI hanya berkisar pada iklan-iklan terbitan resmi pemerintah Orde Baru, yaitu “Presiden Restui Sidang MPBI” dan “Ikrar Bersama MPBI pada tahun 1972”. Dari dasar inilah penelitian ini menunjukkan orisinalitas karya dan penting untuk dilakukan.

---

<sup>24</sup> Arsip tentang Azas dan Tujuan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), Lihat **Lampiran A**.

<sup>25</sup> Hidajat, *Seabad Gerakan*, hlm. 141.

Fokus pembahasan penelitian ini terletak pada konteks pembentukan MPBI sebagai wadah bagi bertemunya setiap jenis organisasi untuk dipersatukan dan dijauhkan dari segala bentuk atribut-atribut politis melalui serangkaian indoktrinasi. Setiap organisasi buruh tingkat nasional oleh pemerintah Orde Baru dihindarkan dari pertarungan-pertarungan ideologis namun dilakukan penguasaan secara intelektual melalui konsensus agar sama dalam melihat masalah perburuhan, gaji swasta dinaikkan untuk meredam upaya pemogokan dan disiapkan lapangan pekerjaan untuk memasuki industri-industri swasta Jepang dalam mendukung Pembangunan Nasional.<sup>26</sup> Semuanya dalam format “Cinta Kerja” dan “Cinta Pembangunan”, seperti sambutan Presiden Soeharto di Istana Merdeka pada saat meresmikan MPBI.<sup>27</sup> MPBI sebagai badan konsultatif serikat buruh dan pemerintah Orba ini kemudian mengalami kemunduran atas ketidakmampuannya membahas urusan-urusan perburuhan. Di lain hal, keterlambatan usaha-usaha menyatukan buruh membuat badan intelijen memberi tekanan pada tokoh-tokoh buruh dan berhasil menginisiasi membentuk satu-satunya vaksentral bernama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Peristiwa pembentukan, relasi serikat buruh - pemerintah dan segala aktivitas dari Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) dalam fungsinya sebagai media konsensus antara perserikatan buruh dengan pemerintah Orde Baru inilah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dipandu dengan beberapa pertanyaan penelitian berikut; *Pertama*, mengapa Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) dibentuk; *Kedua*, bagaimana hubungan antara MPBI dan pemerintah Orde Baru; *Ketiga*, apa aktivitas-aktivitas MPBI dalam mendukung

---

<sup>26</sup>“Pengusaha-pengusaha Djepang tawarkan pekerdjaan bagi tenaga2 buruh Indonesia: Menteri Mursalim setjara pribadi setudju”, *Kompas*, 02 Oktober 1968.

<sup>27</sup>“Buruh Sama Pentingnya Dengan Unsur2 Modal dan Peralatan: Penegasan Presiden Dalam Sidang Pertama Madjelis Permusyawaratan Buruh Indonesia”, *Suara Merdeka*, 03 November 1969.



kekuasaan Orde Baru; *Keempat*, bagaimana proses kemunduran MPBI sebagai media konsensus.

## **B. Ruang Lingkup**

Sejarah atau peristiwa masa lampau terjadi pada lingkup waktu dan tempat tertentu. Ilmu sejarah adalah ilmu yang memanjang dalam waktu dan terbatas pada ruang. Hal ini berpengaruh terhadap setiap penelitian sejarah yang perlu dibatasi oleh ruang lingkup temporal, spasial dan keilmuan. Pembatasan penelitian diikuti dengan alasan mengapa penelitian tersebut dibatasi. Hal ini diperlukan oleh peneliti untuk menentukan langkah-langkah penelitian agar memiliki arah yang jelas. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah menjadikan penelitian lebih mudah untuk dilakukan secara empiris, metodologis, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup> Perangkat pembatas spasial dan temporal adalah mutlak bagi penelitian sejarah, karena dengan batasan tersebut sejarawan akan terhindar dari perihal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

Ruang lingkup temporal merupakan batasan waktu yang dipilih dalam penelitian. Pada penulisan ini, periode yang dipilih adalah kurun waktu 1968 – 1973. Tahun 1968 menjadi pijakan awal bagi peneliti karena merupakan tahun awal bagi Orde Baru untuk melakukan konsolidasi terhadap berbagai lapisan masyarakat dalam mendukung pemerintahannya. Pada aspek perburuhan, pada tahun 1968 pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja, mulai mengajak semua induk organisasi buruh untuk berkumpul dan berdiskusi tentang tujuan Penyederhanaan Organisasi Buruh. Pada tahun ini pula Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) lahir dalam sebuah kesepakatan bersama seluruh induk organisasi buruh.

---

<sup>28</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 19.

<sup>29</sup>Taufik Abdullah, Abdurahman Surjomihardjo (eds), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm xii.

Tahun 1973 merupakan tahun akhir bagi ketidakberdayaan fungsi MPBI sebagai majelis bagi serikat-serikat buruh. Tahun 1973 dipilih sebagai tahun akhir karena pada tahun ini MPBI meleburkan diri ke dalam FBSI. Aktivitas perburuhan hanya berada pada lapisan elite organisasi buruh yang mencapai puncaknya ketika berbagai organisasi buruh menyetujui gagasan pemerintah untuk meleburkan diri dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), setelah sebelumnya menyetujui gagasan KABI dan gagasan awal MPBI pada awal masa Orde Baru.

MPBI tidak mampu menyebar ke daerah-daerah, karena fungsinya yang hanya pada tingkatan pusat atau pimpinan-pimpinan federasi buruh saja,<sup>30</sup> oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada lingkup nasional sebagai batasan ruang lingkup spasial.

Penulisan ini membahas mengenai organisasi buruh yang hanya dipergunakan sebagai alat politik dari pemerintah, oleh karena itu ruang lingkup keilmuan dalam penelitian adalah sejarah sosial politik.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan penelitian, yaitu: *Pertama* menjelaskan sebab-sebab pembentukan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia. *Kedua*, mengungkapkan relasi buruh dan pemerintah Orde Baru melalui Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). *Ketiga*, menganalisis aktivitas-aktivitas perburuhan dalam mendukung kekuasaan Orde Baru melalui MPBI pada tahun 1968-1973. *Keempat* menjelaskan sebab-sebab kemunduran MPBI.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Studi mengenai perburuhan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti berbagai disiplin ilmu. Dalam penelitian ini tidak semua studi akan dibahas, tetapi, hanya beberapa studi penting dan relevan dengan kondisi perburuhan yang ditulis oleh

---

<sup>30</sup>Hidajat, *Seabad Gerakan*, hlm. 140.

beberapa peneliti dalam kajian sosial dan kesejarahan. Buku-buku, skripsi, tesis, dan disertasi tentang Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) belum ada, maka untuk membantu penulisan, sebagai tinjauan pustaka digunakanlah buku yang pertama dari M. S. Hidayat yang berjudul *Seabad Gerakan Buruh Indonesia*. Buku yang sangat komprehensif ini berisi sejarah organisasi buruh dari masa kolonial hingga Orde Baru, yang pada salah satu bagiannya memuat aneka peristiwa dalam pembentukan MPBI.<sup>31</sup>

M. S. Hidayat sebagai penulis buku ini juga merupakan aktivis buruh dari organisasi federatif buruh, “Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO)”, yang mengikuti proses persidangan dalam pembentukan MPBI dan pada saat setelah terbentuk. M.S. Hidayat juga sering menjadi pimpinan sidang yang rutin dilakukan dalam pembentukan MPBI.<sup>32</sup> Namun, walau detail proses persidangan tidak di bahas dalam buku ini, penulis mempunyai alternatif berupa arsip resmi perburuhan nasional Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang menggambarkan jalannya persidangan pada saat pembentukan MPBI.

Selain itu, buku lama yang direproduksi Nuansa Aulia tahun 2012 ini berisi peristiwa-peristiwa yang lebih menonjolkan pada ringkasan sejarah perjalanan perburuhan dan analisa model gerakan buruh di Indonesia sejak masa Hindia Belanda hingga pada masa Orde Baru. Namun demikian, pembahasan M.S. Hidayat tentang perserikatan buruh pada masa Orde Baru tidak terlalu deskriptif. Hal ini memberi perbedaan pada isi penelitian dengan konteks pembahasan mengenai MPBI. Di dalam buku ini juga diterangkan dengan ringkas tentang sebab awal pembentukan MPBI, perkembangan, kelemahan MPBI dan proses peleburan MPBI ke dalam FBSI. Pembahasan M.S. Hidayat juga dipisahkan dari argumentasi akademis dirinya sendiri dengan sikapnya sebagai anggota organisasi GASBIINDO yang tidak tertuang dalam buku ini.

---

<sup>31</sup>M.S. Hidayat, *Seabad Gerakan Buruh*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2012).

<sup>32</sup>“Hasil Sidang Pleno Panitia Pembentukan Wadah Perjuangan Buruh” (Inventaris Koleksi FBSI: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI))

Relevansi buku ini terhadap penelitian adalah tentang fakta-fakta yang diterangkan, pembahasan deklarasi perjuangan buruh dalam pembentukan MPBI, serta Azas dan Tujuan MPBI yang membantu peneliti dalam membangun korelasi antar fakta yang ditemukan penulis dalam pembentukan dan perjalanan MPBI pada masanya. Tentu, fakta-fakta pada arsip, dapat dikaitkan dengan interpretasi M.S. Hidayat dalam buku ini sehingga menjadi sintesis yang akademis.

Buku yang kedua adalah karya dari Agus Sudono, *FBSI Dahulu, Sekarang, dan yang Akan Datang: Sejarah Kelahiran dan Perkembangan FBSI*.<sup>33</sup> Buku tulisan Pimpinan Umum dari FBSI ini, berisi pembahasan tentang FBSI, namun di dalam salah satu bagiannya menjelaskan mengenai perjalanan MPBI yang kemudian menjadi FBSI. Pada buku ini digambarkan mengenai kelemahan-kelemahan organisasi-organisasi buruh dalam manajemen kelembagaan, cara-cara pemerintah Departemen Tenaga Kerja, untuk menyederhanakan fungsi dan eksistensi organisasi buruh menjadi vaksentral yang tunggal, serta keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dalam permasalahan perburuhan.

Sama seperti M.S. Hidayat, tokoh Agus Sudono sendiri merupakan pimpinan dari organisasi buruh GASBIINDO. Pada masa Orde Baru tercatat bahwa organisasi GASBIINDO merupakan salah satu organisasi federatif yang besar selain SARBUMUSI dari NU dan KBKI dari PNI. Agus Sudono juga berpengalaman dalam banyak kegiatan-kegiatan perburuhan mewakili organisasinya di kancah nasional maupun internasional. Berbagai macam seminar di dalam negeri maupun di luar negeri sering memanggil nama Agus Sudono sebagai pembicara dalam kajian perburuhan. Pada konteks pembentukan MPBI, Agus Sudono juga merupakan salah satu tokoh dalam “Panitia 9” yang dibentuk untuk tujuan membentuk peraturan dasar organisasi tunggal buruh. Selain itu, Agus Sudono juga merupakan salah satu tokoh yang menandatangani “Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia” pada tahun 1973 yang merupakan peristiwa awal peleburan MPBI kedalam FBSI yang diketuai pertama kalinya oleh Agus

---

<sup>33</sup>Agus Sudono, *FBSI Dahulu, Sekarang, dan yang Akan Datang: Sejarah Kelahiran dan Perkembangan FBSI* (Jakarta: FBSI, 1984).

Sudono. Pembahasan Agus Sudono tentang perserikatan buruh pada masa Orde Baru terletak hanya pada ringkasan kecil perihal sebab pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Namun demikian, Agus Sudono tidak menjelaskan secara rinci perihal aktivitas-aktivitas yang dilakukan MPBI sebagai suatu badan yang eksis sebelum FBSI berdiri. Hal ini memberi perbedaan terkait isi penelitian yang penulis buat.

Relevansi buku ini dengan penelitian adalah terdapatnya fakta-fakta dalam buku yang menerangkan tentang kelemahan organisasi buruh yang ada pada masa sebelum FBSI berdiri, proses pengambilan keputusan antar organisasi saat membentuk organisasi tunggal, sehingga menjadikan “penyatuan organisasi buruh” menjadi hal yang diharuskan terjadi. Pada konteks ini penulis dapat membangun korelasi antar fakta untuk dituliskan dalam penjelasan yang akademis.

Buku yang ketiga adalah karya dari Dan La Botz, *Made in Indonesia: Indonesian Workers Since Suharto*.<sup>34</sup> Buku ini memuat pembahasan ringkas tentang kondisi buruh dan serikat buruh pada masa Orde Baru secara penuh yaitu hingga sampai tahun 1998. Digambarkan oleh La Botz bahwa pada masa awal Orde Baru, kondisi perburuhan Indonesia penuh kekacauan dan ketimpangan kondisi sosial – ekonomi yang sejalan dengan arus globalisasi. Kondisi upah buruh yang rendah sebesar 1\$ per hari membuat daya tarik investasi menjadi suatu momok yang besar. Hal inilah yang menyebabkan pemerintahan Suharto dalam setiap periode kekuasaannya membuat kebijakan untuk menguasai kelas sosial tersebut. Dalam buku ini, La Botz menerangkan kondisi buruh dan serikat buruh, namun tidak secara deskriptif menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mendasari terbentuknya MPBI. Hal inilah yang memberi perbedaan terhadap isi dari penelitian ini.

Relevansi buku La Botz dengan penelitian ini, walau tidak secara deskriptif memberi penjelasan tentang pembentukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan

---

<sup>34</sup>Dan La Botz, *Made in Indonesia: Indonesian Workers Since Suharto* (Cambridge, Massachusetts: South End Press, 2001).

MPBI. Namun demikian, La Botz memberi penjelasan perihal kondisi sosial-ekonomi perserikatan buruh di Indonesia yang dikaitkan dengan arus globalisasi internasional, arus investasi asing dan supremasi kapital, yang dapat penulis gunakan untuk membantu menganalisis kekuatan perserikatan buruh di Indonesia dan tambahan yang signifikan bagi penulis pada fokus pembahasan tentang arus globalisasi pada masa awal terbentuknya konstitusi yang stabil dari Orde Baru.

Buku yang keempat adalah karya dari Vedi R. Hadiz berjudul *Workers and State in New Order Indonesia*.<sup>35</sup> Buku ini memuat pembahasan yang begitu komprehensif tentang buruh dan serikat buruh pada masa awal Orde Baru. Digambarkan oleh Hadiz bahwa serikat-serikat buruh telah mengalami kelemahan dalam kekuatan politik sehingga kondisi demikian menyebabkan begitu mudahnya kebijakan penyatuan serikat-serikat buruh menjadi suatu organisasi yang tunggal. Buku dalam bahasa Inggris ini memberi keterangan yang cukup deskriptif perihal perjalanan serikat buruh pada masa awal Orde Baru dalam banyak kegiatan, responsnya terhadap kebijakan pemerintahan Suharto dan kondisi-kondisi sosial ekonomi dan politik. Namun demikian, tidak ada pembahasan yang cukup detail perihal aktivitas-aktivitas yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). Hal inilah yang memberi perbedaan terhadap isi dari penelitian ini.

Dalam penerbitan buku yang bekerjasama dengan Asia Research Centre dan Australian Research Centre ini, Vedi Hadiz menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 1969 telah dibuat suatu nota kesepakatan antara perwakilan serikat buruh di Indonesia yang diutus oleh pemerintah dengan organisasi sosial politik dari Jerman Barat yang berafiliasi dengan Partai Sosial Demokrat – Jerman Barat. Kesepakatan ini dibuat dalam rangka bantuan luar negeri terhadap serikat-serikat buruh dengan “orientasi baru” di Indonesia pasca hancurnya gerakan buruh

---

<sup>35</sup>Vedi R., Hadiz, *Workers and State in New Order Indonesia* (Murdoch University, Asia Research Centre, Australian Research Council: Routledge, 1997).

komunis. Kesepakatan yang dibuat di Bonn, Jerman Barat pada pertengahan tahun 1969 ini melahirkan berdirinya Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI).

Relevansi buku dengan penelitain ini adalah bahwa Hadiz memberi penjelasan yang signifikan perihal aktivitas-aktivitas perserikatan buruh dalam responsnya terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Penjelasan yang ringkas namun dalam waktu yang cukup panjang membuat buku ini begitu relevan dalam penelitian. Pemakaian arsip-arsip baru cukup membantu penulis menganalisa peristiwa-peristiwa baru yang cukup detail terkait dengan sepanjang aktivitas yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI).

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penulisan sebuah skripsi memerlukan rangkaian fakta yang disusun secara kronologis dan analitis. Pada proses tersebut, analisis sebuah peristiwa memerlukan konsep atau teori yang relevan dengan masalah yang akan dikupas.

Istilah “**buruh**” pada zaman kolonial digunakan oleh orang-orang pekerja ‘kasar’ seperti kuli, mandor, tukang, dan mereka yang melakukan pekerjaan kasar sejenisnya. Di benua Eropa golongan ini disebut dengan ‘*Blue Collar*’, sedangkan bagi mereka yang bekerja pada pekerjaan ‘halus’ digunakan istilah ‘pegawai’, yang kemudian disebut dengan ‘*White Collar*’. Biasanya orang-orang ini adalah mereka yang bekerja di kantor, instansi, dinas pemerintahan. Perbedaan istilah ‘*Blue Collar*’ dan ‘*White Collar*’ sengaja dibuat sebagai prinsip politik kolonial *divide et-impera*.<sup>36</sup>

Pasca kemerdekaan, tidak dibedakan istilah antara buruh kasar dan buruh halus. Semuanya adalah ‘buruh’ untuk menyebut pada tingkatan “individu” dan sebutan “perburuhan” untuk menyebut “keseluruhan dari para buruh” yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak mempunyai perbedaan apa pun. Namun seiring perkembangan waktu muncul berbagai istilah lain yaitu; “pekerja” sebagai kata untuk sebutan “orang yang bekerja” dan “tenaga kerja” yang

---

<sup>36</sup>Agusfian Wahab, *Orang-Orang dan Badan Yang Bersangkutan dalam DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN* (Jakarta: RajaGraffindo Persada, 1993), hlm. 32.

digunakan untuk menyebut keseluruhan para pekerja, kemudian “karyawan” sebagai kata untuk sebutan “orang yang berkarya” dan “pegawai” yang diidentikkan untuk “orang yang bekerja di institusi negeri”.

Untuk mengetahui bagaimana istilah tersebut digunakan, penulis memakai pendekatan dengan undang-undang atau peraturan yang diterbitkan di setiap masanya. Pada masa Sukarno, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang “Penyelesaian Perselisihan Perburuhan”, istilah buruh digunakan dalam pasal 1 ayat (1) bagian a yang dinyatakan bahwa: “*Buruh adalah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah*”<sup>37</sup>. Menurut Undang-undang ini tidak dibedakan antara buruh kasar dan buruh halus, apapun jenis pekerjaan yang dilakukan jika seseorang bekerja pada majikan (suatu perusahaan) untuk mendapat upah atau gaji disebut dengan buruh.

Sementara itu, tiga tahun sebelumnya, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1954 tentang “Pekerja Pemerintah” pada Bab 1 Pasal 1 bahwa:

“Pekerja menurut peraturan ini ialah mereka yang terutama berhubungan dengan kebutuhan akan tenaga jasmani dan/atau ketangkasan mereka dalam sesuatu jenis pertukangan, diterima untuk diperkerjakan untuk waktu yang tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah dan yang diberi upah tidak menurut peraturan gaji yang berlaku bagi Pegawai Negeri.....”<sup>38</sup>

Dalam peraturan ini digunakan istilah “pekerja” yang dipersonifikasikan sebagai orang yang diperkerjakan pada usaha-usaha Pemerintah / Negeri. Namun istilah tersebut tidak termasuk dan mengacu pada aturan gaji dari Pegawai Negeri itu sendiri.

Pada konteks ini tidak ditemukan penjelasan aturan yang memuat “pertentangan / dikotomi” dalam penyebutan istilah antara ‘buruh’ dan “pekerja”.

---

<sup>37</sup> *Pasal 1 Poin (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dalam Lembaran Negara No. 1227 (Lembaran Negara Republik Indonesia: No. 1 - 66 Tahun 1957).*

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954 dalam hukumonline.com, diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul 20:04 WIB.



Problematika istilah baru muncul pada dekade 60-an di lingkungan organisasi-organisasi buruh / pekerja yang timbul karena karena pertentangan ideologis. Pertentangan tersebut berada pada persoalan pilihan bahasa antara “*buruh*” dan “*karyawan*” yang masing-masing membawa persoalan tentang interpretasinya terhadap model perjuangan buruh. Jiwa-zaman dari periode 60’an membawa istilah *buruh* pada istilah “perjuangan kelas” atau “revolusi”. Sedangkan istilah *karyawan* mengacu pada “asas kekeluargaan” atau “kerjasama pengusaha-karyawan”. Kedua istilah tersebut sama-sama berarti “pekerja”. Diterangkan oleh Dr. Susetiawan yang mengutip Jacques Leclerc menerangkan:

“...serikat-serikat pekerja yang mempergunakan istilah *buruh* didukung oleh anggota-anggota Partai Komunis Indonesia / PKI. *Buruh*, sebuah kata yang berasal dari bahasa lisan petani Jawa, diidentifikasi dengan konsep proletariat yang menunjukkan pada suatu hubungan konflik antara para majikan dan pekerja, dengan demikian menekankan ide perjuangan kelas. Istilah *karyawan* memiliki arti persatuan antara para majikan, manajemen, dan para pekerja. Hubungan antara manajemen dengan pekerja bersifat kooperatif dan bebas dari konflik. *Karyawan* berasal dari bahasa Sanskrit yang sebagian besar hanya terbatas pada penggunaan intelektual.”<sup>39</sup>

Pertentangan tersebut menjadikan bahasa yang merupakan sistem simbolik masyarakat lebih berada pada konflik kepentingan antar kelompok yang berseberangan. Kedua *elite* yang berbeda tersebut membangun dikotomi istilah “buruh” dan “karyawan” dengan tujuan mengonstruksi hubungan industrial di masing-masing kelompok. Istilah “buruh” bagi PKI, di satu pihak merupakan basis politik massa pekerja yang dibutuhkan untuk melawan kapitalisme. Sedangkan bagi kelompok yang mendukung perkembangan kapitalisme, dibangun

---

<sup>39</sup>Jacques Leclerc, *An Ideological Problem of Indonesian Trade Unionism in the Sixties : “Karyawan” versus “Buruh”*, *Review of Indonesian and Malayan Affairs (RIMA)*, vol. 6, no. 1, Jan-Jul 1978, hlm. 76 – 91 dalam Dr. Susetiawan, *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 74.

ideologi *unionism* pekerja “karyawan” yang merupakan sebuah cara untuk mencegah konflik dalam hubungan industrial.<sup>40</sup>

“Buruh” adalah istilah umum untuk semua pegawai di tingkat swasta, sebelum istilah tersebut diubah menjadi “pekerja” pada pertengahan masa Orde Baru. Sementara itu, istilah bagi seseorang yang bekerja di perusahaan negeri, telah dipakai istilah “karyawan” untuk membedakannya dengan buruh. Dalam perkembangannya buruh hanya dijadikan alat politik penguasa untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah ekonomi atau mendukung kebijakan politik, sehingga “Media Konsensus” dapat dipahami sebagai hubungan dominasi pemerintah terhadap organisasi perburuhan Indonesia sebagai upaya konsolidasi membangun kesepakatan atas kepentingan pemerintah.

Pada masa awal Orde Baru istilah buruh masih menjadi sebutan yang wajar bagi agenda-agenda pemerintahan seperti dalam pembentukan kesatuan, dipakailah nama “Kesatuan Aksi Buruh Indonesia”, kemudian dalam suatu ruang konsensus antar-aktivis buruh dipakailah nama “Majelis Buruh Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia”. Di dalam undang-undang, istilah buruh masih menjadi pelengkap pasal-pasal dalam banyak peraturan dan ketetapan, serta penyebutan bagi setiap warga negara yang bekerja pada majikan.

Periode awal Orde Baru menghadirkan istilah baru yaitu, Tenaga Kerja yang diterangkan di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Kerja dalam pasal 1 yang menyebutkan istilah Tenaga Kerja sebagai berikut: “Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”<sup>41</sup>

Istilah ‘tenaga kerja’ hadir sebagai bentuk ketentuan umum dalam peraturan segala hal mengenai pekerja. Di dalam pasal penjelas diterangkan bahwa yang

---

<sup>40</sup> Dr. Susetiawan, *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 74.

<sup>41</sup> *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 dalam Lembaran Negara No. 55 Tahun 1969, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 - 61 Tahun 1969* (Jakarta: Sekretariat Kabinet R.I, 1970).

termasuk Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi baik tenaga fisik maupun pikiran. Hubungan kerja yang dimaksud adalah orang yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.

Persoalan pertentangan dalam penyebutan dan pemilihan kata yang masing-masing mempunyai arti yang sama tersebut, menurut Prof. Iman Soepomo, walaupun istilah buruh tidak dirumuskan secara jelas apa dan siapa itu buruh, istilah tersebut masih dipergunakan sebagai bentuk pemufakatan (*afspraak*). Artinya adalah bahwa seseorang dapat bermufakat untuk menggunakan istilah buruh, karyawan, pekerja, dan lainnya untuk orang yang bekerja dalam hubungan kerja.<sup>42</sup> Dalam konteks penulisan pada masa awal terbentuknya Orde Baru, istilah buruh masih digunakan yaitu: Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) tahun 1966-1968, Majelis Permusyawaratan Buruh - Indonesia (MPBI) tahun 1968-1973, dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) tahun 1973-1985, sebelum akhirnya diubah karena “pertentangan sensitif ideologis” menjadi “Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)” pada tahun 1985 sebagai konsistensi terhadap UU Nomor 14 Tahun 1969 yang telah mengeliminir semua istilah “buruh” dan diganti dengan “pekerja”

Penulisan skripsi ini memakai istilah buruh sebagai bentuk konsistensi terhadap fakta peristiwa yang terjadi. Istilah buruh masih dipergunakan pada aneka macam organisasi perburuhan termasuk Majelis Permusyawaratan ‘Buruh’ Indonesia (MPBI).

Pengertian ‘Organisasi Buruh’ disebutkan pada UU No. 14 Tahun 1969 Bab V mengenai Hubungan Ketenagakerjaan<sup>43</sup> bahwa:

Pasal 11:

---

<sup>42</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta:Penerbit Djambatan, 1970), hlm 27.

<sup>43</sup>*Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 dalam Lembaran Negara No. 55 Tahun 1969, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 - 61 Tahun 1969* (Jakarta: Sekretariat Kabinet R.I, 1970).

Ayat (1): “Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja”.

Ayat (2): “Pembentukan perserikatan kerja dilakukan secara demokratis.”

Pasal 12: “Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja.”

Pasal 13: “Penggunaan hak mogok, demonstrasi, lock-out, diatur dengan peraturan perundangan.”

Pasal 14: “Norma pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan.”

Pasal 15: “Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungjawaban sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.”

Sebagai bagian dari upaya mengatur setiap organisasi buruh, pasal penjelas UU. No. 14 Tahun 1969 mengatur bahwa setiap *‘perserikatan tenaga kerja’* wajib turut serta mengamankan dan menegakkan Pancasila. ‘Organisasi buruh’ diadakan oleh pemerintah untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan tenaga kerja. Sesuai yang terkandung dalam Pasal Penjelas No. 2912, UU. No. 14 Tahun 1969, bahwa ‘Perserikatan Tenaga Kerja’ diciptakan hanya pada fungsi ‘Sosial Ekonomi’ dalam usaha mencapai masyarakat Pancasila.<sup>44</sup>

Sesuai dengan terminologi “Majelis” dalam nama serta berdasarkan asas dan tujuannya, MPBI mempunyai fungsi sebagai badan konsultasi yang berkaitan dengan suatu wadah bagi organisasi-organisasi buruh untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan perburuhan. Namun demikian, pada kenyataannya arah pergerakan MPBI menjadi “mendua” dan “melenceng”, karena harus berjalan di bawah kontrol atau hegemoni pemerintah. Kasus-kasus perburuhan tidak dapat diselesaikan, terjadi krisis kepemimpinan, dan orientasi dalam sidang-sidang MPBI hanya berkisar pada usaha penyederhaaan serikat-serikat buruh. Ketidakjelasan cara kerja MPBI dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menggunakannya sebagai media indoktrinasi terkait dengan produktivitas nasional. Pasca pemilu 1971, seminar-seminar indoktriner terkait pembangunan

---

<sup>44</sup> *Penjelasan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 No. 2912 dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2880 - 2917 Tahun 1969, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2880 - 2917 Tahun 1969 (Jakarta: Sekretariat Kabinet R.I, 1970).*

nasional gencar dilakukan oleh MPBI bersama dengan pemerintah. Lemahnya otoritas MPBI dan kekuatan anggotanya, membuat para pemimpin organisasi buruh diinstruksikan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk bertemu dengan Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pada pertengahan tahun 1972. Pertemuan pada bulan Mei 1972 ini, diberi instruksi untuk merumuskan “Penyederhanaan Organisasi Buruh”. Lemahnya kekuatan politik MPBI, membuat badan ini kemudian melakukan penyesuaian kebijakan atau konformitas dengan mengadakan Sidang Pleno untuk mengeluarkan Ikrar Bersama pembentukan (Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai satu-satunya vaksentral tunggal di Indonesia.

Vaksentral merupakan organisasi buruh yang berupa himpunan dari serikat-serikat. Vaksentral adalah istilah lain untuk menyebut organisasi dengan bentuk federasi. Federasi buruh merupakan badan organisasi yang berbentuk gabungan dari organisasi-organisasi dalam satu badan. Pengindukan ini didasari dengan berbagai macam alasan yaitu; aliran atau ideologi yang sama, lokasi perusahaan, atau bidang yang sama dalam perusahaan. Dalam konteks kelembagaan, organisasi buruh dengan tingkatan terkecil merupakan serikat-serikat buruh tingkat perusahaan dengan jenis yang sesuai dalam bidang perusahaan dan hanya berada di dalam perusahaan itu. Sebagian besar serikat-serikat buruh tingkat perusahaan mempunyai induk organisasi yang berbentuk federasi. Sedangkan dalam tingkatan terbesar berbentuk konfederasi yaitu berbentuk induk dari federasi-federasi buruh.

Dalam konteks kelembagaan, organisasi buruh dengan tingkatan terkecil merupakan serikat-serikat buruh tingkat perusahaan dengan jenis dalam bidang perusahaan dan hanya berada di dalam perusahaan itu. Sebagian besar serikat-serikat buruh tingkat perusahaan mempunyai induk organisasi yang berbentuk federasi. Federasi buruh merupakan badan organisasi yang berbentuk gabungan dari organisasi-organisasi dalam satu badan. Pengindukan ini didasari dengan berbagai macam alasan yaitu; aliran atau ideologi yang sama, lokasi perusahaan, atau bidang yang sama dalam perusahaan.

Pada pembahasan mengenai ‘Relasi’ antara buruh dan kekuasaan Orde Baru digunakan konsep ‘Hegemoni’ sebagai alat bantu analisis terhadap fakta peristiwa yang terjadi dalam relasi antara buruh dan negara, dalam hal ini melalui Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI).

Hegemoni berasal dari kata Yunani *eugemonia* yang berarti dominasi. Konsep hegemoni berasal dari seorang pemikir Italia Antonio Gramsci yang lahir di kota kecil Sardinia, Italia pada tahun 1891. Pemikiran Gramsci yang terkenal berasal dari kumpulan catatannya selama di penjara yaitu *Queqreni Del Carcere* atau *Selection From The Prison Notebooks* yang ditulis di penjara antara tahun 1929 dan 1935. Sebagian tulisannya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris padasekitar tahun 1970-an.<sup>45</sup> Hegemoni merupakan penguasaan kelas sosial dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.<sup>46</sup> Menurut Antonio Gramsci;

“Hegemoni merupakan hubungan/relasi antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis.”

Antonio Gramsci menyebutkan bahwa Hegemoni dibangun oleh ‘Negara’ yang sudah dikuasai oleh kelas sosial tertentu yang oleh Gramsci disebut sebagai ‘Negara Integral’ yang terdiri atas dua organisme sosial yaitu, (1) Masyarakat Politik (*Political Society*), sebagai sarana penekan dan (2) Masyarakat Sipil (*Civil Society*) sebagai hegemoni kelompok sosial.

Masyarakat Politik dalam hal ini bukanlah dipahami dalam pengertian ‘Negara’, namun merupakan:

“Hubungan-hubungan yang terwujud dalam berbagai lembaga negara, angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum, departemen dan administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan sosial yang merupakan bagian dari monopoli negara dalam

---

<sup>45</sup>Siswanta, *Relasi Kekuasaan: Telaah Pemikiran Antonio Gramsci Dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Media Wacana, 2006), hlm. 35.

<sup>46</sup>Simon, *Gagasan-Gagasan*, hlm 19.

melakukan penguasaan terhadap aparat negara dengan jalan kekerasan”<sup>47</sup>

Selanjutnya adalah Masyarakat Sipil (*Civil Society*) yang menurut Gramsci merupakan:

“Masyarakat yang mencakup semua organisasi-organisasi swasta, seperti, serikat dagang, serikat buruh, gereja, perkumpulan budaya di luar dari aparat negara. Semua organisasi yang membentuk masyarakat sipil ini merupakan hasil dari jaringan kerja dan di dalam masyarakat sipil hegemoni kelas dominan dibangun melalui mekanisme perjuangan politik dan ideologis.”<sup>48</sup>

Masyarakat Politik (*Political Society*) dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*) menjadikan ‘Negara Integral’ menguasai aparatnya dan kelompok sosial di bawahnya, salah satunya adalah Serikat Buruh. Gramsci menyebut bahwa Negara adalah gabungan dari Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil.<sup>49</sup>

Selanjutnya adalah Hegemoni dalam pelaksanaan. Hegemoni dari negara yang berkuasa terhadap kelas yang dikuasai dan dibangun melalui titik tolak ‘Konsensus’.<sup>50</sup> Konsensus merupakan hasil dari kepemimpinan yang bersifat moral dan tanpa kekerasan. Konsensus lebih menekankan pengertian bahwa suatu hal tercipta karena sebuah ‘persetujuan’ atau ‘kesepakatan’. Gramsci mengatakan bahwa:

“Dalam tatanan sosial yang teratur harus ada dasar persetujuan (*Substratum of Agreement*) yang kuat yang dapat melawan kekuatan-kekuatan yang menghancurkan yang muncul dari perbedaan kepentingan. Konsensus dalam arti ini berada dalam hubungan dengan

---

<sup>47</sup>Siswanta, *Relasi Kekuasaan*, hlm. 51.

<sup>48</sup>Siswanta, *Relasi Kekuasaan*, hlm 50.

<sup>49</sup>Nezar, *Antonio Gramsci*, hlm. 139.

<sup>50</sup>Antonio Gramsci, *Selections From The Prison Notebooks* (New York, International Publisher: 1976), hlm 62

objek-objek tertentu, pribadi, kepercayaan nilai-nilai, lembaga-lembaga maupun yang lain.”<sup>51</sup>

Kondisi demikian terjadi pada tahun 1968 pada waktu serikat buruh, dan induk organisasi buruh lainnya yang tersisa dan bukan komunis dikumpulkan oleh negara melalui Departemen Tenaga Kerja dalam sebuah konsensus nasional untuk dipersatukan ke dalam MPBI. Kemudian sidang-sidang antar-organisasi perburuhan diadakan pada tahun 1969-1972 oleh pemerintah untuk menjalankan gagasan “penyatuan organisasi buruh” dan membahas aturan-aturan penyatuan organisasi. Aktivitas demikian berlangsung hingga seluruh organisasi perburuhan di Indonesia bergabung menjadi satu organisasi tunggal yang dinamakan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) pada tahun 1973.

Tulisan Gramsci tidak secara spesifik menerangkan mengenai bentuk konsensus yang menentukan situasi hegemoni. Penulis meminjam konsep dari Guru Besar FISIP UI Maswadi Rauf mengenai bentuk dari ‘Konsensus’ untuk membantu menganalisis fakta peristiwa yang terjadi.

Maswadi Rauf menyebutkan bahwa:

“Konsensus terbentuk bila pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi berhasil mencapai titik temu, yakni pendapat yang sama sehingga tidak ada masalah dalam hubungan sosial tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama mendapat keuntungan/manfaat yang wajar dari hubungan tadi”<sup>52</sup>

Mencapai sebuah konsensus adalah tugas yang harus dilakukan agar masyarakat dapat berjalan dengan tenang dan tertib. Peranan dari penguasa politik/negara sebagai pelaksana konsensus adalah menciptakan stabilitas sosial dalam sebuah negara. Walau studi tentang konsensus di Indonesia masih sangat kurang, Maswadi Rauf mencatat bahwa ada bentuk-bentuk konsensus, yaitu: (a) Pemilu

---

<sup>51</sup>Heru Hendarto, *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci; dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan* (Jakarta, Tim Redaksi Driyarkara, Gramedia: 1993) hlm 81.

<sup>52</sup>Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 13-14



yang hasilnya merupakan sebuah konsensus yang dicapai secara damai dalam sebuah organisasi/partai politik karena dalam pemilu terdapat cara-cara persuasif. Konsensus melalui cara ini dicapai dengan menyerahkan hasil kesepakatan kepada rakyat yang memilih. Konteks pemilu dalam teori Maswadi Rauf ini sesuai dengan peristiwa setelah Pemilihan Umum 1971, keanggotaan MPBI menjadi lemah. Hal ini mengacu pada ketidakmampuan serikat-serikat buruh afiliasi partai untuk menggalang massa pemilih sehingga menjadikan Sekber Golkar keluar sebagai pemenang Pemilu dengan jumlah suara mutlak sebesar 62 persen mengalahkan 10 (sepuluh) partai politik yang ada. Kemudian teori Maswadi Rauf yang dipakai selanjutnya adalah (b) Musyawarah, yaitu suatu alat yang bertujuan mencari titik temu antara pihak-pihak guna memperoleh kesepakatan. Musyawarah adalah sebuah konsensus politik dimana pihak-pihak menyetujui pendapat sebagai hasil dari pembicaraan yang intensif dalam musyawarah. Semua pihak menyetujui pendapat berdasarkan kehendak dan kesadaran sendiri. Kelemahan dalam konsensus ini adalah sering terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam dan besarnya keyakinan dari masing-masing pihak.<sup>53</sup> Musyawarah dalam pergulatan politik penguasaan pemerintah Orde Baru terhadap kelas sosial buruh menjadi agenda utama dalam setiap pengambilan putusan. Namun demikian, hasil musyawarah ini hanyalah berupa konformitas atau penyesuaian semata atas kebenaran yang dihadirkan oleh pemerintah terhadap perserikatan buruh. Artinya, tidak ada kesadaran sendiri atau dasar akal sehat yang kuat dari serikat buruh. Situasi demikian merupakan fenomena politik hegemoni yang oleh Antonio Gramsci di atas telah di bahas.

Analisis Maswadi Rauf tentang bentuk konsensus merupakan fakta peristiwa yang terjadi pada periode Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia. Pada tahun 1968, pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja mengumpulkan induk organisasi buruh untuk mendengarkan pendapat pemerintah yang kemudian disetujui oleh organisasi buruh beberapa bulan setelahnya. Organisasi buruh yang

---

<sup>53</sup>Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, hlm. 36-37.

semula adalah *onderbouw* dari Partai Politik kehilangan induknya setelah Pemilihan Umum 1971, karena fusi partai politik yang dilakukan pemerintah. Pada tahun 1972, terjadi musyawarah nasional organisasi buruh untuk mengeluarkan Ikrar Bersama Penyederhanaan dan Penggabungan Organisasi Buruh.

Proses konsensus yang damai menjadikan organisasi buruh melakukan penyesuaian diri pada strategi pemerintahan Orde Baru. Pada point ini Antonio Gramsci menggambarkan beberapa bentuk penyesuaian diri. Kategori dalam penyesuaian diri menurut Gramsci terdiri atas tiga hal, yaitu<sup>54</sup>:

1. Penyesuaian diri (konformitas) karena rasa takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan. Konformitas ditempuh melalui tekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan.
2. Penyesuaian diri karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleksikan dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab seseorang/kelompok menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan tidak ada kemungkinan untuk menolak.
3. Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat.

Gramsci mengatakan bahwa hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi, dalam hal ini adalah buruh.

Konsensus untuk mendapatkan persetujuan ide dari pemerintah mengenai “Penyederhanaan Organisasi Buruh” ini adalah akibat dari kekurangan basis pengetahuan dari organisasi buruh yang membentuk kesadaran mereka untuk memahami realitas sosial secara efektif. Melihat fenomena ini pemerintah dengan aktor intelektualnya yaitu Militer dan Sekber Golkar menyerang intelektual kelas pekerja dengan konsensus, sehingga cita-cita membentuk organisasi tunggal

---

<sup>54</sup>Hendarto, *Mengenal*, hlm. 80.

Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) terwujud pada tanggal 20 Februari 1973. Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia ditandatangani oleh 9 orang dan pada akhirnya MPBI meleburkan diri ke dalam FBSI. Prof. Iman Soepomo melihat fenomena ini dengan sebutan “Bergelegarnya Lonceng Kematian”<sup>55</sup>

## F. Metode Penelitian

Penulisan sejarah juga memiliki metode seperti ilmu alam dan ilmu sosial yang lain. Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah kritis yang merupakan suatu proses menganalisis dan menguji rekaman atau peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam penulisan sejarah. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

Heuristik merupakan tahap pertama dalam penelitian sejarah, yaitu aktivitas pengumpulan sumber/data sejarah, baik sumber primer maupun sekunder.<sup>56</sup> Pengumpulan sumber ini sangat penting guna memperoleh data yang dibutuhkan baik secara tertulis maupun lisan. Sumber primer yang berupa arsip-arsip sezaman diperoleh dari berbagai tempat diantaranya; Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Arsip pribadi dari informan dan Arsip-arsip dari instansi-instansi yang terkait dengan topik, koran-koran dan majalah lama yang didapatkan di Lantai 4 Perpustakaan Universitas Diponegoro, Monumen Pers di Solo-Jawa Tengah, dan Perpustakaan Nasional. Sumber sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel dalam majalah diperoleh dari Perpustakaan wilayah Jawa Tengah, Perpustakaan Universitas Diponegoro Lantai 1 – 4, Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Fakultas Hukum Undip, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Nasional.

---

<sup>55</sup>Soepomo, *Pengantar Hukum*, hlm 37.

<sup>56</sup>Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter*, dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm 45; Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 94-97.

Kritik Sumber adalah tahapan kedua dalam metode sejarah yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh fakta yang otentik dan kredibel. Kritik sumber penting bagi peneliti untuk dapat menyaring informasi yang didapat selama proses pengumpulan data. Kritik sumber ekstern adalah kritik yang dilakukan untuk mengetahui otentisitas (keaslian) suatu sumber sejarah. Pada umumnya, arsip yang terdapat dalam lembaga resmi dapat segera diketahui otentisitasnya. Kritik yang kedua adalah kritik intern. Ini dilakukan untuk menguji kebenaran suatu dokumen, sehingga didapatkan fakta yang kredibel.<sup>57</sup>

Interpretasi merupakan tahap ketiga dari metode sejarah sebelum historiografi. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan makna dan hubungan antar-fakta yang relevan. Tahap ini juga bertujuan untuk menafsirkan fakta yang sudah diuji keaslian dan kebenarannya untuk diceritakan kembali. Dalam proses ini diperlukan imajinasi, konsep atau teori ilmu sosial untuk membantu sejarawan dalam membuat sintesis antar-fakta. Tahap ini menuntut daya imajinasi peneliti dalam menggambarkan suatu kejadian masa lalu, dengan tetap berdasarkan fakta-fakta sejarah.

Tahap terakhir pada metode sejarah adalah historiografi yaitu tahap penulisan sejarah. Setelah sumber sejarah melewati tahap-tahap sebelumnya, siaplah mereka untuk dirangkai menjadi sebuah karya tulis yang ilmiah. Apabila semua tahap dilewati dengan benar, akan dihasilkan karya sejarah yang diharapkan yaitu sebuah tulisan sejarah yang deskriptif-analitis dengan mengedepankan aspek keilmiahan yang tinggi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan penggunaan sumber serta sistematika penulisan.

---

<sup>57</sup> Sartono Kartodirdjo, *“Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah”* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm 20.

Bab II berjudul Menuju Pembentukan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) tahun 1945 – 1965 yang merupakan penjabaran atas kondisi perserikatan perburuhan pada masa awal kemerdekaan hingga pada akhir masa Demokrasi Terpimpin yang mendasari dibentuknya suatu badan majelis yaitu MPBI pada masa Orde Baru. Pada bab ini dibahas mengenai peristiwa-peristiwa sebagai berikut: (A) Serikat Buruh dalam Arena Politik (1945-1965). Sub-bab ini berisi tentang perjalanan perserikatan buruh dari pergerakan kebangsaan hingga terbentuknya ragam ideologi perserikatan buruh dalam usahanya membangun persatuan dengan pemerintah hingga terjadinya konflik dengan militer.<sup>58</sup> Dalam sub-bab ini juga dianalisis pengamatan perihal masing-masing serikat buruh nasional anggota MPBI beserta latar belakang kelembagaan organisasi. Dalam 20 tahun (1945-1965), tercatat terdapat tiga kekuatan utama dalam perserikatan buruh yang juga penulis jadikan sebagai sub-sub-subbab yaitu serikat buruh afiliasi partai politik, serikat buruh bentukan militer dan serikat-serikat buruh independen. Ketiga arena politik dalam serikat buruh ini selanjutnya dibahas secara kronologis pada masing-masing serikat buruh dalam kaitannya terhadap keanggotaan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). Sub-bab yang kedua adalah (B) Dinamika Konflik Antar Serikat Buruh (1945-1965). Dalam subbab ini diterangkan perihal akar konflik yang mendasari terjadinya konflik perburuhan sebelum pada masa Orde Baru. Subab-bab yang ketiga adalah (C) Keterlibatan Pemerintah dalam Penyatuan Antarserikat Buruh (1957-1965). Sebagai bentuk usaha mempersatukan buruh dalam tujuan-tujuan bersama, pemerintah sebelum Orde Baru mempunyai strategi dan cara-cara mempersatukan perserikatan buruh yang kesemuanya akan dijelaskan dalam sub-bab ini.

Bab III berjudul Dasar Pembentukan Konsensus Politik: Perburuhan Nasional dalam Masa Transisi (1965-1968). Pasca terjadinya “Gerakan 30 September 1965”, kondisi politik perburuhan mengalami perubahan total. Segala hal ide perburuhan yang berkaitan dengan unsur-unsur “PKI”, “SOBSI” dan “Komunisme” dan “Perjuangan Kelas” menjadi tema pokok kebencian dan akar

---

<sup>58</sup>Sadali, *Sejarah Gerakan Buruh* (Pustaka Pena, 2002), hlm. 92.

konflik berdarah dari massa buruh baik di tingkat pusat maupun daerah-daerah pada bulan-bulan terakhir tahun 1965. Situasi ini berlanjut dengan hadirnya kampanye penolakan terhadap “Presiden Sukarno” dan segala kebijakan yang dibuatnya pada awal tahun 1966. Kondisi demikian membangun suasana politik perburuhan ke dalam atmosfer ketakutan, kecemasan dan kewaspadaan nasional. Momentum ini secara langsung mendelegitimasi peran Front Nasional sebagai induk pemersatu serikat-serikat buruh dan praktis menyisakan Sekretariat Bersama Golongan Karya sebagai anggota FN yang anti terhadap komunisme. Peran Sekber Golkar yang semula menampung khusus serikat-serikat non-afiliasi berubah saat serikat-serikat afiliasi partai kehilangan induknya. Dengan demikian, koalisi antikomunisme bertambah kuat dalam tubuh Sekber Golkar dengan tambahan serikat-serikat buruh afiliasi partai yang turut bergabung dalam Sekber Golkar.

Pada bab ini dijelaskan kondisi serikat-serikat buruh pada masa transisi kepemimpinan politik yang mendasari terbentuknya konsensus politik perburuhan di tingkat pusat. Pembahasan utamanya berangkat dari bencana kemanusiaan, pembaruan struktur politik perburuhan, lahirnya kekuatan baru dalam serikat buruh dan keterlibatan pemerintah Orde Baru bersama serikat buruh luar negeri dalam membangun kekuatan serikat buruh di tingkat nasional, yang dalam setiap sub-subbabnya akan dijabarkan dalam; (1) Bencana Nasional dan Pembersihan, (2) Lahirnya Kekuatan Baru: Sekretariat Bersama Golongan Karya dan Kekuatan Organisasi Buruh, dan (3) Badan Kerja Sama Proyek Buruh Indonesia (BAKERPROBI): Kerja Sama Pemerintah Orde Baru dengan Organisasi Luar Negeri.

Bab IV berjudul Konsensus Sebagai Jalan Politik: Di Sekitar Pembentukan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). Dalam bab ini diterangkan bahwa pada tahun 1969 telah dimulai sidang Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang bertujuan untuk membuat peraturan dasar organisasi. Pembahasan tentang sidang MPBI dan pertentangan pendapat yang menyertainya serta kronologis proses pembentukannya akan dibahas dalam bab ini dan dijabarkan dalam sub-subbab yaitu: (A) Kemelut Politik dan Militerisasi

Perburuhan, (B) Usaha Pemerintah dalam Membangun Konsensus Politik, dan (C) Pembentukan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia.

Bab V berjudul Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI): Media Konsensus Politik dan Kemundurannya tahun 1969-1973. Pada bab ini diterangkan secara naratif-kronologis bahwa pada saat sidang pleno Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) berlangsung pada bulan April 1969, bersamaan dengan dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang pertama pada masa Orde Baru. Strategi pemerintahan Suharto pada pembangunan pertama ini adalah “meningkatkan produktivitas nasional”, yang tentu dimaksud adalah jalannya kembali perusahaan-perusahaan baik domestic maupun luar negeri bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Untuk lebih mendorong terwujudnya keinginan itu dengan cepat, pemerintahan Orde Baru mendirikan Panitia “Pusat Produktivitas Nasional”. Badan yudikatif MPBI sudah menjadi alat pemerintah untuk menyebarkan doktrin-doktrin baru perserikatan buruh. Konsensus politik dan strategi penyebaran doktrin dijabarkan dalam bab ini dengan sub-subab yang menyertai yaitu: (A) Bentuk-Bentuk Konsensus Politik, (B) Kemunduran MPBI sebagai Media Konsensus dan (C) Peleburan MPBI ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)

Bab VI adalah Simpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.